

ILMU EKONOMI

A. Pengertian Ilmu Ekonomi dan Ruang Lingkupnya

Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani asal kata ‘oikosnamos’ atau oikonomia’ yang artinya ‘manajemen urusan rumah-tangga’, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. (Sastradipoera, 2001: 4). Namun sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumberdaya secara fundamental perlu diadakan efisiensi termasuk pekerja dan produksinya, maka dalam bahasa modern istilah ‘ekonomi’ tersebut menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat=alat sesedikit mungkin. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa definisi tentang ilmu ekonomi.

Menurut Albert L. Meyers (Abdullah, 1992: 5) ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah; *pertama*, tentang “kebutuhan” — yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. *Kedua*, tentang” pemuas kebutuhan” yang memiliki ciri-ciri “terbatas” adanya. Aspek yang kedua inilah menurut Lipsey (1981: 5) yang menimbulkan masalah dalam ekonomi, yaitu karena adanya suatu kenyataan yang senjang, karena kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa jumlahnya tak terbatas, sedangkan di lain pihak barang-barang dan jasa-jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sifatnya langka ataupun terbatas. Itulah sebabnya maka manusia di dalam hidupnya selalu berhadapan dengan kekecewaan maupun ketidakpastian. Definisi ini nampaknya begitu luas sehingga kita sulit memahami secara spesifik.

Ahli ekonomi lainnya yaitu J.L. Meij (Abdullah, 1992: 6) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis, karena ditinjau dari aspek ekonomi di mana manusia sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) pada hakekatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi, sesuai yang dituliskan pelopor “liberalisme ekonomi” oleh Adam Smith dalam buku “*An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*” tahun 1776. Namun dengan cara bagaimana manusia itu berusaha mencapai kemakmurannya ? Dalam definisi yang dikemukakan Meij memang tidak dijelaskan.

Kemudian Samuelson dan Nordhaus (1990: 5) mengemukakan “*Ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya — baik saat ini maupun di masa depan — kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.* Menurut Samuelson

bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu pilihan. Ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih penggunaan sumber-sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi, dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Jika disimpulkan dari tiga pendapat di atas walaupun kalimatnya berbeda, namun tersirat bahwa pada hakikatnya ilmu ekonomi itu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka/terbatas itu. Dengan kata lain yang sederhana bahwa ilmu ekonomi itu merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia.

Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yakni ilmu ekonomi positif dan normatif (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 9). Jika ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai dan etika, seperti haruskan sistem perpajakan diarahkan pada kaidah mengambil dari yang kaya untuk menolong yang miskin? Lebih jelasnya Sastradipoera, 2001: 4, mengemukakan.

Ilmu ekonomi positif merupakan ilmu yang hanya melibatkan diri dalam masalah 'apakah yang terjadi' Oleh karena itu ilmu ekonomi positif itu netral terhadap nilai-nilai. Artinya ilmu ekonomi positif itu 'bebas nilai' (*value free* atau *wertfrei*)...hanya menjelaskan 'apakah harga itu' dan 'apakah yang akan terjadi jika harga itu naik atau turun' bukan 'apakah harga itu adil atau tidak'...*Ilmu ekonomi normative*, bertentangan dengan ilmu positif, ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah 'apakah yang seharusnya terjadi'. Esensi dasar ilmu ekonomi adalah pertimbangan nilai (*value judgment*). Seorang ekonom penganut etika puritan egalitarianisme, Gunnar Myrdal (1898-1987) lebih suka menyebutnya 'ilmu ekonomi institusional'.

Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial, tentu berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis lainnya, seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sebagai contoh kegiatan-kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi, seperti kebijaksanaan proteksi terhadap industri kecil, undang-undang perpajakan, dan sanksi-sanksi ekonomi. Ini artinya bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatan politik (Abdulah, 1992: 6).

Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, artinya juga mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Dan perlu diketahui, bahwa mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi, tujuannya adalah berusaha untuk mengerti hakikat dari peristiwa-peristiwa tersebut yang selanjutnya untuk dipahaminya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi itu untuk: (1) *mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik yang berupa hubungan*

kausal maupun fungsional. (2) untuk dapat menguasai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. (Abdullah, 1992:7).

Ilmu ekonomi juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Walaupun kita ketahui dalam ilmu ini telah digunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif-matematis, tetapi pendekatan-pendekatan tersebut tidak dapat menghilangkan keterbatasan-keterbatasannya yang melekat pada ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Abdullah, (1992: 8), keterbatasan-keterbatasan tersebut mencakup:

- (1) Objek penyelidikan ilmu ekonomi tidak dapat dilokalisasikan. Sebagai akibatnya kesimpulan atau generalisasi yang diambilnya bersifat kontekstual (akan terikat oleh ruang dan waktu).
- (2) Dalam ilmu ekonomi manusia selain berkedudukan sebagai subjek yang menyelidiki, juga objek yang diselidiki. Oleh karena itu hasil penyelidikannya yang berupa kesimpulan ataupun generalisasi, tidak dapat bersifat mutlak, di mana unsure-unsur subjeknya akan mewarnai kesimpulan tersebut.
- (3) Tidak ada laboratorium untuk mengadakan percobaan-percobaan. Sebagai akibatnya ramalan-ramalan ekonomi sering kurang tepat.
- (4) Ekonomi hanya merupakan salah satu bagian saja dari seluruh program aktivitas di suatu negara. Oleh karena itu apa yang direncanakan (*ex-ante*) dan kenyataannya (*ex-post*) sering tidak sejalan.

Sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasannya tersebut, maka sebagai akibatnya sifat keberlakuan generalisasinya yang berupa dalil-dalil atau hukum-hukum dan teori-teorinya akan tergantung kepada konteks ruang dan waktu serta tidak mutlak. Jadi sifat keberlakuan dalil-dalil atau hukum-hukumnya adalah bersyarat. Yaitu bila yang lainnya tidak berubah Syarat ini bisa disebut juga dengan "Ceteris Paribus". Hal ini disebabkan oleh hukum-hukum ekonomi merupakan pernyataan-pernyataan tentang tendensi-tendensi ekonomi. Ia merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana tingkah laku tersebut juga dipengaruhi atau tergantung kepada situasi dan kondisi yang berlaku pada suatu saat. Jadi ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tetap tidak dapat melepaskan dirinya dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh ilmu sosial.

Ditinjau dari ruang-lingkup/cakupannya, ilmu ekonomi juga dapat dibedakan atas makroekonomi dan mikroekonomi (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 99). Istilah "makroekonomi" itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch pada tahun 1933, untuk diterapkan pada studi mengenai hubungan antar agregat ekonomi yang bersifat luas, seperti; pendapatan nasional, inflasi, pengangguran agregat, neraca pembayaran (Taylor, 2000: 597). Perlu diketahui bahwa pada masa sebelumnya, sasaran kebijakan kamroekonomi adalah kesempatan kerja *full employment* (kondisi di mana seluruh sumber daya, khususnya tenaga kerja, bisa terserap sepenuhnya) dan stabilitas harga. Stabilitas *ouput* dari dari tahun ke tahun — untuk menghindari ledakan pertumbuhan atau resesi yang sangat parah — merupakan sasaran tambahan. Tetapi, tingkat pertumbuhan *output* pada jangka waktu yang lebih panjang, tergantung pada banyak faktor — seperti teknologi, pelatihan, dan insentif — yang cenderung

termasuk dalam "sisi penawaran" atau kebijakan mikroekonomi. Dalam perekonomian yang terbuka, baik posisi neraca pembayaran (balance of payment) atau pola tingkat pertukaran di pasar pertukaran valuta asing dapat dipandang sebagai tujuan yang terpisah dari kebijakan makroekonomi atau sebagai suatu halangan terhadap operasional makroekonomi (Britton, 2000: 596).

Dalam hal ini instrumen kebijakan makroekonomi adalah moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral, sebagai contoh oleh Bank Indonesia. Ketat/tidaknya kebijakan ini dapat diukur dari tingkat suku bunga riil (yaitu suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi) atau melalui pertunbuan penawaran uang (yang didefinisikan secara berbeda-beda)> Salah satu keuntungan kebijakan moneter sebagai alat untuk mempengaruhi perekonomian adalah berbeda dari kebijakan fiskal., kebijakan ini bisa dikaji ulang dan diubah secara kontinu berdasarkan informasi baru (Britton, 2000: 596).

Sedangkan kebijakan fiskal adalah perpajakan dan pembelanjaan masyarakat yang dikontrol oleh pemerintah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah mendapat engesahan dari badan legislatif. Pajak dan pembelanjaan mempengaruhi perekonomian melalui cara yang berbeda-beda, tetapi 'kebijakan fiskal' dalam konteks saat ini adalah efek bujet sebagai suatu keseluruhan terhadap tingkat agregat permintaan dalam perekonomian. Kecuali dalam situasi darurat, kebijakan fiskal biasanya diubah sekali setahun. Kegunaannya dalam mengatur perekonomian juga ditentukan oleh kemampuan dalam menangani anggaran publik itu sendirisecara bijaksana (Britton, 2000: 596).

Penggunaan pinjaman publik dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan perekonomian diterima sebagai suatu prinsip kebijakan pada tahun 1950-an dan 1960-an, seiring dengan gagasan Maynard Keynes yang telah mengubah banyak prinsip ekonomi. Selanjutnya, di tahun 1970-an dan 1980-an muncullah neo klasik atau kontra revolusi monetaris yang berasal dari Chicago dan dipimpin Milton Friedman. Isu yang mendasar dalam perdebatan ini berkaitan dengan hubungan antara dua tujuan dari *full employment* dan stabilitas harga. Hal ini dimungkinkan (melalui pemotongan pajak atau pemotongan tingkat suku bunga), untuk meningkatkan ketenagakerjaan dalam jangka pendek tanpa harus membuat inflasi meningkat cepat. Namun, dalam jangka apanjang argumentasi neo klasik menyatakan bahwa situasi ini tidak bisa berbalik (dengan tingkat pengangguran kembali pada level "alamiah" dan tidak ada yang bisa ditunjukkan untuk kebijakan perluasan kecuali terjadinya inflasi yang lebih tinggi.

Menurut Britton (2000: 597), tidak bisa dipungkiri, dalam praktiknya catatan kebijakan makroekonmi sejak tahun 1970-an lebih banyak mengalami kegagalan dibandingkan keberhasilan. Inflasi meningkat tajam di sebagian besar negara, terutama pada periode kenaikan harga minyak dunia yang paling dramatis, 1974 dan 1979. Sejak tahun 1980-an inflasi lebih rendah, tetapi pada saat bersamaan pengangguran di banyak negara jauh lebih tinggi. Respons terhadap berbagai kekecewaan ini telah mengarahkan pada tindakan memperkenalkan desain kebijakan baru untuk meningkatkan "saling tukar" (*trade off*) antara dua sasaran. Di tahun 1970-an, khususnya di Inggris, penekanannya yang utama adalah kebijakan harga dan penghasilan. Pendekatan lain, yang berlanjut hingga

tahun 1990-an, melibatkan tindakan-tindakan ketenagakerjaan khusus yang dirancang untuk membantu pengaturan secara langsung dengan cara memberikan pelatihan atau mencarikan lowongan pekerjaan yang sesuai untuk mereka.

Ini sangat berbeda dengan studimengenai unit-unit pengambilan keputusan individual dalam perekonomian seperti rumah tangga, pekerja dan perusahaan, yang secara umum dikenal dengan sebutan mikroekonomi. Sebagai contoh ekonomi mikro meneliti determinasi harga terhadap beras, atau harga relatif beras dan baja atau *employment* dalam industri baja, sementara ekonomi makro berurusan dengan determinasi tingkat *employment* dalam suatu perekonomian khusus, atau dengan tingkat harga dari seluruh komoditas. Kendati perbedaan antara dua bidang analisis ekonomi ini berguna untuk berbagai tujuan.

Perkembangan ekonomi mikro sebagai suatu bidang tersendiri, merupakan bagian dari pendekatan marjinal atau neo klasik yang mulai mendominasi teori ekonomi setelah tahun 1970-an. Berbeda dengan ekonomo klasik, yang menyoroti pertumbuhan ekonomi negara akibat pertumbuhan sumber daya produktif mereka, serta menjelaskan harga relatif barang berdasarkan kondisi-kondisi obyektif dari biaya-biaya produksinya. Dalam teori neo klasik mengarahkan perhatiannya pada alokasi sumber daya yang tersedia secara efektif (dengan asumsi implisit mengenai *fullemployment*) dan pada determinasi 'subyektif' terhadap harga-harga individual yang berdasarkan pada kegunaan marjinal (Asimakopulos, 2000: 660).

Terdapat enam topik yang sering dipresentasikan dalam ekonomi mikro, yakni; (1) teori perilaku konsumen, (2) teori pertukaran, (3) teori produksi dan biaya, (4) teori perusahaan, (5) teori distribusi, dan (6) teori ekonomi kesejahteraan (Asimakopulos, 2000: 661). Tema umum yang mendasari semua topik tersebut adalah upaya dari para aktor individual untuk meraih suatu posisi yang optimal, dengan nilai-nilai parameter yang membatasi pilihan mereka. Para konsumen berusaha untuk memaksimalkan kepuasan (atau kegunaan), sesuai dengan selera, pendapatan mereka dan harga barang-barang; perusahaan berusaha memaksimalkan laba mereka, dan ini berarti bahwa dengan tingkat *output* berapapun diproduksi dengan biaya terendah. Syarat-syarat maksimalisasi tersirat dalam istilah ekualitas marjinal (*marginal revenue*) sama dengan biaya mrginal (*marginal cost*).

Dewasa ini ilmu ekonomi telah berkembang jauh melebihi ilmu-ilmu sosial lainnya yang terbagi-bagi dalam beberapa bidang kajian seperti;

Ekonomi Lingkungan. Bidang kajian 'ekonomi lingkungan' (*environmental economics*) ini bermula dari tulisan Gray (1900-an), Pigou (1920-an), dan Hotelling (1930-an), akan tetapi baru mncul sebagai studi koheren pada tahun 1970-an, yakni ketika revolusi lingkungan mulai terjadi di berbagai negara (Pearce, 2000: 300). Selanjutnya, jika ditinjau dari substansinya, terdapat tiga unsur pokok dalam ekonomi lingkungan, yakni; *Pertama*, kesejahteraan manusia sedang terancam oleh degradasi lingkungan dan penyusutan sumber daya alam. Dalam hal ini sangat mudah untuk menunjukkan bukti konkret dari timbulnya bencana banjir yang disebabkan oleh penggundulan hutan, pembukaan lahan untuk perumahan dan industri, terjadinya erosi, dan sebagainya. Semuanya ini

memiliki dampak bukan saja pada kesehatan, tetapi juga secara ekonomis merugikan kehidupan manusia.

Kedua, kerusakan lingkungan disebabkan oleh penyimpangan/kegagalan ekonomi, terutama yang bersumber dari pasar. Hal ini dapat diambil contoh, bahwa karena orientasi produk dan profit, tidak sedikit beberapa industri yang mengabaikan analisis dampak lingkungan yang merugikan (*externality*) bagi masyarakat luas. Begitu juga banyak industri-industri global yang menempatkan pabrik-pabrik dari negara maju ke hutan-hutan dan persawahan di negara berkembang. *Ketiga*, solusi kerusakan lingkungan harus mengoreksi unsur-unsur ekonomi sebagai penyebabnya. Seperti halnya dengan kebijakan subsidi, relokasi industri, dan sebagainya, yang kiranya merusak lingkungan, harus segera dihentikan. Selain itu, jika aktivitas 'destruktif' terselubung yang merugikan itu sulit dihentikan, perlu ada penerapan pajak ekstra atau penerbitan lisensi khusus demi merendahkan kegiatan tersebut. Langkah ini pernah dilakukan di Amerika Serikat yang menerbitkan lisensi polusi dan lisensi memancing, yang ternyata cukup efektif mengatasi masalah tersebut (Pearce, 2000:300).

Ekonomi Evolusioner : Merupakan bidang kajian ekonomi yang menjelaskan naik turunnya pertumbuhan ekonomi dan jatuh bangunnya perusahaan-perusahaan, kota-kota, kawasan dan negara, yang mencerminkan bahwa evolusi selalu beroperasi pada tingkat yang berlainan dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Dan, hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya bidang-bidang baru kegiatan ekonomi (Metcalf, 2000: 324). Dengan demikian selalu dipertanyakan mengapa dan bagaimana perekonomian dunia berubah, sehingga tinjauannya bersifat dinamis, untuk menangkap keragaman perilaku yang memperkaya perubahan sejarah. Tema-tema inilah yang sering dibicarakan dalam sejarah (Landes, 1968; Mokyr, 1991), yang semuanya bertolak dari suatu mekanisme yang sama, namun menentukan pula keragaman perilaku ekonomi.

Ekonomi evolusioner, juga merupakan entitas-entitas yang memiliki berbagai karakteristik atau ciri perilaku, yakni; *stabilitas kelangsungan perilaku dari waktu ke waktu*, sehingga kita dapat mengaitkan ciri-ciri perilaku di masa mendatang dengan yang ada pada saat ini. Dengan demikian inersia (*inertia*) merupakan elemen pengikat penting serta tampak jelas bahwa evolusi tidak dapat berlangsung di dunia di mana individu-individu atau organisasinya berperilaku secara acak/random. Begitu juga dalam kajian mengenai sumber keragaman perilaku ekonomi, para ahli lebih menaruh perhatian pada pengaruh teknologi, organisasi, dan manajemen berdasarkan pemahaman bagaimana suatu tindakan dilangsungkan sehingga memunculkan ciri-ciri perilaku yang menguntungkan. Kemudian timbul pertanyaan; apakah evolusi itu mengandung rasionalitas?. Di sini nampaknya tidak. Sebab dalam dunia manapun, di mana pengetahuan dihargai cukup mahal sertakapasitas komputasional senantiasanya terbatas, maka kita tidak memiliki ijakan yang layak untuk mengupayakan optimistisasi secara pasti, sebagai pedoman guna menilai perilaku. Walaupun tidak disangkal lagi bahwabahwa individu senantiasanya mencari hasil yang terbaikdari serangkaian pilihan yang ada, akan tetapi kalkulasi yang

dipergunakannya mungkin saja bersifat lokal, dan tidak bersifat global. Hal inilah yang merupakan sumber keragaman perilaku tersebut (Metcalf, 2000: 324).

Ekonomi Eksperimental: Bidang ekonomi eksperimental pada mulanya merupakan hasil-hasil studi perilaku pilihan individu, terutama ketika para ekonom memusatkan perhatiannya pada teori-teori mikroekonomi. Teori tersebut bertumpu pada preferensi-preferensi individu, di mana mereka menyadari bahwa bidang tersebut sulit dipelajari dalam lingkungan alamiah, sehingga dirasakan perlunya merumuskan sarana laboratorium. Sebagai pengujian awal formal atas teori-teori pilihan individu (*individual choice*), dapat ditemukan pada tulisan Thurstone dalam *The Indifference Function* (1931) yang menggunakan teknik-teknik eksperimental. Kemudian didukung pula oleh teori harapan kepuasan (*expected utility theory*) mengajukan prediksi-prediksi lebih gamblang, maka pada tahun 1950 Melvin Dresher dan Merrill Flood melakukan eksperimen awal secara formal dilaksanakan. Ternyata teori ini memang cocok untuk mempelajari perilaku, kendati masih ada penyimpangan. Selain itu, teori ini juga diterapkan pula pada studi tentang pengadaan barang publik, yang dilakukan secara survey oleh Ledyard dalam *Publik Goods: a survey of experimental research* tahun 1995 (Roth, 2000: 332).

Sebagai eksperimen awal tentang hal ini dilakukan oleh Thomas Schelling dalam karyanya *The Strategy of Conflict* (1960). Eksperimen ini sangat berguna untuk mengisolasi dampak-dampak aturan main tertentu yang harus diorganisir pasar. Tentang kajian umum mengenai ilmu ekonomi eksperimental dan ulasannya tentang sejarah dan perkembangannya, telah dimuat dalam karya Roth "Introduction to experimental economics" (1990). Begitu juga Sunder dalam *Experimental asset markets: a survey* (1995), yang menyoroti pasar-pasar komoditi, seperti; pasar ang dan asar modal, di mana informasi memegang peranan sedemikian penting. Pendeknya, 'ilmu ekonomi eksperimental' kini telah menjadi perangkat riset yang mapan bagi perkembangan ekonomi secara umum (Roth, 2000: 334).

Ekonomi Kesehatan: Ilmu ekonomi (*health economics*) kesehatan berusaha melakukan analisis terhadap input-input perawatan kesehatan, seperti pembelanjaan dan tenaga kerja, memperkerikan dampak-adampaknya pada hasil akhir yang diinginkan, yakni kesehatan masyarakat. Sedangkan tujuannya ilmu ekonomi kesehatan tersebut adalah menggeneralisasikan aneka informasi mengenai biaya dan keuntungan dari cara-cara alternatif mencapai kesehatan dan tujuan-tujuan kesehatan (Maynard, 2000: 427).

Dalam realitasnya, evaluasi mengenai perawatan kesehatan itu jarang dilakukan baik yang bersifat publik (pemerintah) maupun pribadi (misalnya individu pembuat keputusan dan anggota keluarganya). Bahkan Cochrane dalam tulisannya yang berjudul *Effectiveness and Efficiency* (1971) mengeluhkan kebiasaan buruk tersebut dengan mengemukakan: "hampir semua terapi perawatan kesehatan, tidak pernah dievaluasi secara 'ilmiah'. Maksud 'ilmiah' di sini adalah bahwa aplikasi ujicoba terkontrol yang sifatnya random oleh pelaksana terapi terhadap kelompok eksperimental pasien yang diambil secara acak. Serta sebuah konsep terapi alternatif sebagai pembandingnya. Jika ada perbedaan

signifikan antara hasil terapi pada kelompok kontrol, berarti dampak relatif dari terapi tersebut benar-benar berpengaruh maupun bermakna.

Ekonomi Institusional. Ekonomi institusional (*institutional economics*) merupakan studi tentang sistem-sistem sosial yang membatasi penggunaan dan pertukaran sumber daya langka, serta upaya-upaya untuk menjelaskan munculnya berbagai bentuk pengaturan institusional yang masing-masing mengandung konsekuensi tersendiri terhadap kinerja ekonomi (Eggertsson, 2000: 501). Lahirnya ilmu ekonomi institusional ini bertolak dari asumsi-asumsi

1. Kontrol yang lemah akan mendorong pemborosan dan pemanfaatan sumber daya secara sembrono.
2. Kontrol yang tertib akan menurunkan niat curang dan memperkecil biaya transaksi yang selanjutnya memacu spesialisasi produksi dan investasi jangka panjang.
3. Pemilahan kontrol sosial mempengaruhi distribusi kekayaan.
4. Kontrol organisasional mempengaruhi pilihan organisasi ekonomi.
5. Kontrol bisa secara langsung mengatur pemakaian sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap paling tepat.
6. Struktur kontrol mempengaruhi pengembangan jangka panjang sistem ekonomi karena struktur itu mempengaruhi nilai relatif investasi dan jenis-jenis proyek yang akan diutamakan (Eggertsson, 2000: 501).

Ditinjau dari usianya, ilmu ekonomi institusional tersebut relatif baru, karena secara formal baru berdiri sejak tahun 1980, kendati perintisannya jauh dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Coase dalam *The Nature of the Firm* (1937), dan *The Problem of Social Cost* (1960), tentang biaya transaksi; Alchian dalam *Some economics of property* (1961) tentang hak cipta. Pada tahun 1980-an inilah upaya-upaya pengembangan teori ekonomi umum yang baku tentang institusi memperoleh momentumnya. Penyempurnaan-penyempurnaan pendekatan standar dalam ilmu ekonomi telah berhasil dilakukan, bersamaan dengan munculnya ekonomi neo-institusional yang mencakup berbagai hal penting yang semula tidak termasuk dalam pendekatan konvensional. Beberapa modifikasi tersebut telah diterima sebagai bagian dari aliran utama ilmu ekonomi serta cabang-cabangnya seperti; studi organisasi industri seperti yang ditulis Milgram dan Roberts, 1992; dan ekonomi hukum yang ditulis Posner, 1992, (Eggertsson, 2000: 503).

Ekonomi Matematik. Ilmu 'ekonomi matematik' (*mathematical economics*) mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Sebelum terjadi formalisasi ekonomi matematika dan sebelum dikenal teknik-teknik canggih dalam analisis matematika ekonomi tersebut terutama bertumpu pada teknik-teknik analisis grafik dan presentasi. Memang pada tingkat tertentu sangat efektif, tetapi teknik-teknik tersebut juga dibatasi oleh karakter dua dimensional dari selimut kertas. Selain itu juga, teknik-teknik grafik dapat mengemukakan asumsi-asumsi implisit yang signifikansinya mungkin tidak kentara atau sangat sulit dimengerti (Hughes, 2000: 630). Tetapi setelah tahun 1950-an, terutama yang ditandai oleh arus

perpindahan ahli-ahli matematika menjadi akademisi ekonomi (seperti Kenneth Arrow, Gerard Debreu, Frank Hahn, Werner Hildenbrant), maka ilmu ekonomi matematik-pun menjadi berkembang dengan pesat sebagai suatu disiplin ilmiah.

Ditinjau dari substansinya dalam ekonomi matematik tersebut, mula-mula digunakannya teori ekuasi simultan (*simultaneous equations*) oleh *Leon Walras*, untuk membahas problem ekuilibrium dalam beberapa pasar yang saling berhubungan dengan digunakannya kalkulus oleh *Edgeworth* untuk menganalisis perilaku konsumen. Berbagai permasalahan ini tetap berada pada inti ekonomi matematika modern, kendati teknik-teknik matematika yang diterapkan telah berubah seluruhnya. Analisis ekuilibrium umum telah menjadi sangat bergantung pada perkembangan modern dalam tipologi dan analisis fungsional, sehingga pembagian bidang antara tipe ekonomi matematika yang cukup abstrak dengan matematika murni, hampir tidak jelas sama sekali. Kemudian substansi lainnya adalah teori perilaku konsumen atau produsen, individual mendapatkan manfaat dan kemajuan melalui teori program matematika dan teori analisis cembung atau *convex analysis* (Hughes, 2000: 631). Sebagai implikasinya hasil dari penerapan kalkulus digolongkan pada suatu teori umum yang didasarkan pada konsep fungsi nilai maksimum/minimum, yaitu suatu fungsi laba maupun biaya untuk produsen. Hal ini merupakan suatu fungsi kegunaan atau pembelanjaan tidak langsung bagi konsumen. Dengan demikian teori ini menggali hasil dualitas yang menandai berbagai masalah maksimalisasi dan minimalisasi yang saling berhubungan, yang dapat diberi interpretasi ekonom langsung. Seperti halnya kumpulan 'harga-harga bayangan' dengan berbagai hambatan yang membatasi berbagai pilihan yang layak. Pendekatan terhadap teori konsumen dan produsen tersebut mempunyai implikasi-implikasi empiris yang penting dan dapat diuji (Hughes, 2000: 631).

Ekonomi Sumber Daya Alam; Ilmu ekonomi sumber daya alam (natural resource economics), merupakan bidang ekonomi yang mencakup kajian deskriptif dan normatif terhadap alokasi berbagai sumber daya alam (yaitu sumber daya yang tidak diciptakan melalui kegiatan manusia, melainkan disediakan oleh alam). Beberapa masalah penting dalam hal ini berkaitan dengan jumlah sumber tertentu yang bisa atau harus ditransformasikan dalam proses-proses ekonomi, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya antara generasi sekarang dan yang akan datang (Sweeney, 2000: 697).

Ekonomi Pertahanan. Ekonomi pertahanan (*defence economic*), merupakan studi tentang biaya-biaya pertahanan yang mengkaji masalah pertahanan dan erdamaian dengan menggunakan analisis dan metode ekonomi yang meliputi kajian mikroekonomi dan makroekonomi seperti optimisasi statis dan dinamis, teori-teori pertumbuhan, distribusi, perbandingan data statistik dan ekonometrik (penggunaan statistika model ekonomi). Sedangkan pelaku-pelaku dalam studi ini antara lain, Menteri Pertahanan, birokrat, kontraktor pertahanan, anggota parlemen, bangsa-bangsa yang bersekutu, para gerilyawan, teroris dan pemberontak (Sandler, 2000: 208).

Bidang ini berkembang pesat setelah Perang Dunia II, yang topik-topiknya mencakup; perlombaan senjata, studi aliansi dan pembagian beban, kesejahteraan, penjualan senjata, kebijakan pembelian senjata, pertahanan dan pembangunan,

industri senjata, persetujuan embatasan senjata, dampak ekonomis dari suatu erjanjian, evaluasi usulan perlucutan senjata, pengalihan industri pertahanan, dan sebagainya. Ketka terjadi Perang Dingin Blok barat dan Timur, perhatian ekonomi pertahanan umumnya tertuju pada masalah-masalah beban pertahanan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada pasca Perang Dingin, para ekonom pertahanan memusatkan perhatian pada konversi perindustrian militer, aspek sumber daya persenjataan, biaya pemeliharaan pasukan penjaga perdamaian, dan pengukuran keuntungan perdamaian (Sandler, 2000: 209).

B. Metode Ilmu Ekonmi

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ilmu ekonomi secara sederhana merupakan uapaya manusia untuk pemenuhan kebutuhannya yang bersifat tak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa yang bersifat langka serta mempunyai kegunaan altrnatif. Untuk dalam cara pemenuhan kebutuhan itulah berkaitan dengan metode-metode dalam ilmu ekonomi tersebut.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam ilmu ekonmi, menurut Chaurnain dan Prihatin (1994: 14-16) meliputi:

1. *Meode Induktif*; yaitu metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data iformasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Realita tersebut dalam setiap unsur kehidupan yang dialami individu, keluarga, masyarakat local dan sebagainya mencoba dicari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhannya tersebut dapat dikaji secara secermat mungkin. Sebagai contoh upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga sampai diperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan perencanaan yang dalam ilmu ekonomi berfungsi sebagai cara ataupun metode untuk menyusun daftar kebutuhan terhadap sejumlah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
2. *Metode Deduktif*; adalah suatu metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah, sesuai dengan acuan, prinsip, hukum dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Misalnya, dalam ilmu ekonomi terdapat hukum yang mengemukakan bahwa “jika persediaan barang-barang dan jasa berkurang dalam masyarakat, sementara permintaannya tetap, maka maka barang-barang dan jasa-jasa akan naik harganya”. Bertolak dari hukum ekonomi tersebut, para ahli ekonomi secara deduktif sudah dapat menentukan bahwa harus dijaga agar persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tersebut selalu dapat mencukupi dalam kuantitas dan kualitasnya. Boulding (1955: 12) menyebutnya sebagai metode eksperimen intelektual (*the method of intellectual experiment*).
3. *Meode Matematika*; adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara

matematis. Hal ini maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajiannya itu dapat diterima secara umum.

4. *Meode Statistika*; adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran data, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka-angka yang disajikan, kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya untuk kemudian dicarikan cara pemecahannya. Sebagai contoh, pembahasan mengenai masalah pengangguran. Dalam hal ini bisa terlebih dahulu diidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan pengangguran, misalnya; data-data perusahaan, data-data tenaga kerja yang terdidik/kurang terdidik, jenis dan jumlah lapangan kerja yang tersedia, jumlah dan tingkat upah yang ditawarkan perusahaan, tempat perusahaan beroperasi, maupun rata-rata tempat tinggal para calon pekerja. Dari data yang terkumpul tersebut, seorang ahli ekonomi akan dapat menyusun pengolahan/analisis dan penafsiran data secara statistik yang berhubungan dengan pemecahan masalah pengangguran tersebut. Dari angka-angka statistik tersebut kemudian ia dapat menentukan cara-cara yang tepat untuk membantu mengatasi masalah masalah pengangguran secara akurat berdasarkan tafsiran peneliti terhadap angka-angka yang disajikan secara statistik.

B. Sejarah Lahir dan Perkembangan Ilmu Ekonomi

Menurut Irving Kristol, ilmu ekonomi sebagai sebuah disiplin akademis, dalam perjalanan sejarah, muncul pada abad ke-17 dan 18 sebagai suatu aspek “revolusi” filosofis yang menciptakan dunia “modern” (Kristol, 1981: 203). Dalam hal ini “manusia ekonomi” yang diciptakan ilmu ekonomi tampil sebagai manusia yang ingin mencapai kepuasan yang tertinggi.

Jika ditelusuri lebih jauh kisah, konsep “manusia ekonomi” itu dapat ditelusuri dalam falsafah *Psikologi Asosiatif* khususnya “hedonisme” serta falsafah “utilitarianisme” yang banyak merambah pengikutnya sejak abad 18 dan 19. Dan kalau ingin ditelusuri lebih jauh lagi “hedonisme” sudah ada sejak zaman Yunani kuno, salah seorang tokohnya yang terkenal adalah Epikurus (341-271 s.M.) Paham ini berpendapat bahwa kepuasan merupakan satu-satunya alasan dalam tindak susila. Hal ini sesuai dengan pendapat Joseph Schumpeter (1954) menulis sebagai berikut:

Buku ini akan memaparkan perkembangan dan nasib baik analisis ilmiah di bidang ilmu ekonomi, mulai dari zaman *Greaco-Roman* hingga sekarang, dalam suatu kerangka sosial dan politik yang memadai dengan tetap memberi perhatian pada perkembangan-perkembangan di berbagai bidang ilmu sosial lainnya dan juga filsafat.

Sedikit sekali para ekonom kontemporer yang mau melacak ilmunya dari peradaban *Greaco-Roman* (Yunani-Romawi) dan tidak banyak pula yang menonjolkan keamatan hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu-ilmu lainnya

seperti dengan sejarah maupun filsafat (Bills, 2002: 273). Namun dengan menyediakan tulisan 200 halaman, Schumpeter sengaja melacak hal itu sebelum Adam Smith tahun 1776 menulis *The Wealth of Nations*, yang menandai munculnya ilmu ekonomi yang sepenuhnya berdiri sendiri (Bill, 2002: 273).

Pertama, ide-ide yang berkembang pada jaman Renaissance yang menyatakan bahwa manusia adalah bagian dari alam yang berdaulat. Gagasan ini membebaskan para analis ekonomi untuk menerapkan metode-metode rasional dan reduksionis guna mengikis anggapan-anggapan ekonomi yang tidak didasarkan pada fakta atau kajian ilmiah (misalnya, anggapan orang hanya bisa disebut kaya jika ia punya banyak emas).

Kedua, ilmu ekonomi terbebaskan dari ikatan moral, namun tidak lantas menjadi sosok negara yang penuh kekuasaan yang politik ekonominya amoral seperti yang diperkirakan para merkantilis dan teoretisi lainnya, yang di mata Adam Smith dan kawan-kawan tidak realistis. Ilmu ekonomi sekedar lebih “dingin” dalam menanggapi soal-soal moral, dan membuka diri terhadap kajian kritis.

Ketiga, tujuan analisis ekonomi meluas, bukan sekedar pada pemilihan kebijakan dagang demi memperbesar kekuatan negara, melainkan juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan sehari-hari. Perkembangan individualisme libelar di abad 17 dan 18 menggarisbawahi pergeseran itu. Mulai banyak analisis yang dicurahkan pada pengerjaan kesejahteraan individu yang telah dipandang sebagai sesuatu yang wajar, dan tidak lagi dianggap sebagai wujud keserakahan (Bliss, 2000: 273).

Pernyataan yang terakhir inilah nampak adanya titik temu dua aliran besar, yakni aliran yang menghendaki kiprah aktif negara, dan aliran *laissez faire*. Kedua-duanya sama-sama menganggap penting peran negara/pemerintah dalam perekonomian. Hanya saja mereka masih berbeda pendapat secara mendasar tentang sejauh mana peran itu dilakukan? Kebijakan menjadi topik kajian yang sangat diminati, dan sampai sekarang aneka model dan rumusannya terus dikembangkan demi memudahkan berlangsungnya perumusan kebijakan ekonomi yang sebaik-baiknya.

Ilmu ekonomi sendiri terus bergulat dengan persoalan-persoalan epistemologi dan aksiologinya. Ilmu ekonomi memang bukan ilmu pasti seperti fisika, biologi, maupun kimia yang serba eksak. Ilmu ekonomi memiliki model-model data dan asumsi-asumsinya sendiri yang bersifat menyederhanakan atau simplistik. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai, tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Padahal ilmu pada umumnya bebas nilai (bukan dalam pengertian acak, namun bebas dari penilaian si ilmuwan).

Secara umum, asumsi kedaulatan selera individu tidak dipersoalkan oleh para ekonom. Sejak Vilfredo Pareto sampai sekarang, dukungan bagi pengajaran kepentingan individu merupakan inti ekonomi kesejahteraan. Namun Hicks (1969) menentang pandangan itu dengan mengungkapkan adanya tiga kelemahan dalam evaluasinya. Hal ini didukung oleh Arrow (1973) yang secara meyakinkan dapat menunjukkan melalui sebuah fungsi kesejahteraan yang diderivasikan dari preferensi individu bahwa prinsip kedaulatan konsumen akan memunculkan pemaksaan atau kediktatoran satu individu kepada individu lainnya. Meskipun

rumusan Arrow itu controversial (lihat misalnya Sen, 1979), namun pendapatnya telah mengubah keyakinan mutlak tentang kedaulatan konsumen yang semula diangungkan.

Memang sejumlah ekonom lebih suka menanggalkan sikap netral dan melacak implikasi dari suatu kebijakan berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, meskipun ekonom lain mempertahankannya. Hal ini antara lain terwujud berupa teori kebijakan keuangan publik yang mementingkan kepentingan umum; misalnya mereka menegaskan bahwa pajak rata-rata (lump taxation) adalah yang paling baik karena tagihan yang dibebankannya terhadap setiap wajib pajak relatif paling kecil, meskipun distribusinya tidak merata (pajak yang dibayarkan oleh orang kaya dan miskin tidak banyak berbeda (Atkinson dan Stiglitz, 1980).

Perdebatan ini tidaklah berarti bahwa ilmu ekonomi sejak awal sudah demikian sarat dengan nilai. Usulan pajak rata-rata itu lebih bertolak dari sikap yang tidak terlalu mementingkan kaitan antara efisiensi dan distribusi pungutan pajak, serta sikap itu sendiri diwarnai oleh angan-angan akan adanya lembaga-lembaga ekonomi yang sempurna dan mampu menjangkau batas kemungkinan kepuasan (utility possibility frontier) melalui kebijakan tertentu. Ilmu ekonomi modern berusaha mencapai “kompatibilitas intensif” atau pengutamaan disain dan fungsi lembaga-lembaga ekonomi, termasuk perpajakan, di mana setiap individu dimudahkan oleh negara dalam mengejar kepentingannya (Fudenberg dan Tirole, 1991).

Dalam ekonomi modern, disain kebijakannya jauh lebih rumit dan canggih, dan begitu juga asumsi pembatasannya lebih banyak daripada perekonomian pada abad sebelumnya khususnya abad ke-18. Bentuk dan sejauh mana peran negara dalam ekonomi dimodelkan dalam konteks disain sistem perpajakan dan regulasi. Harus diakui bahwa kajian tentang desain kebijakan ini kian lama kian lengkap.

Lalu seberapa jauh keberhasilan ilmu ekonomi di akhir abad 20 atau awal 21? Ditinjau sekilas secara ekologis, ilmu ekonomi memang cukup berhasil. Ia mampu mereproduksi diri secara efisien. Namun kemampuannya dalam memecahkan masalah masih perlu dipertanyakan. Bahkan sejak pertengahan tahun 1970-an, para ekonom sering mempertanyakan relevansi ilmu mereka dengan kebijakan, khususnya dalam ekonomi makro yang teori-teorinya masih jauh dari efektif, meskipun mereka sendiri — termasuk Adam Smith dahulu — menyadari bahwa teori tidak akan dapat memperbaiki kondisi pasar. Betapa-pun, ilmu ekonomi akan tetap menarik karena dapat menawarkan perspektif guna memahami apa yang terjadi di pasar.

Hampir setiap kekeliruan kebijakan selalu ditimpakan pada pemikiran intelektual yang melandasinya. Hal ini tidak selalu benar, karena ada kalanya kegagalan kebijakan disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi ataupun yang lain. Sebaliknya kegagalan ekonomi bisa ikut menyebabkan hancurnya suatu sistem negara seperti yang dialami sistem komunisme di Uni Soviet dan Eropa Timur lainnya. Namun tentu saja pasar atau ekonomi dan langkah-langkah pembinaannya (misalnya liberalisasi) bukan satu-satunya solusi. Hal ini terbukti dengan gagalnya serangkaian reformasi ekonomi di bekas negara-negara komunis

Eropa Timur itu. Kondisi ekonomi di setiap masyarakat terbukti tidak bisa dilepaskan dari pengalaman dan presumsi sejarahnya (Bliss, 2000: 277).

C. Mazhab-mazhab dalam Ekonomi

Ilmu ekonomi mengenal berbagai mazhab, menurut Sastradipoera (2001: 12-82) terdapat delapan mazhab ilmu ekonomi, yaitu mazhab:(1) merkantilis; (2) fisiokrat; (3) klasik; (4) sosialis; (5) historis; (6) marjinalis; (7) institusionalis; (8) kesejahteraan.

Mazhab merkantilisme muncul antara Abad Pertengahan dengan kejayaan *Laissez-Faire* (1500-1776 atau 1800). Menurut Eatwell (1987: 445), merkantilisme merupakan babak panjang pertalian sederhana dalam sejarah pemikiran ekonomi Eropa dan kebijaksanaan ekonomi nasional, yang membentang sekitar tahun 1500 sampai tahun 1800. Adanya ‘penemuan-penemuan’ daerah baru yang luas memiliki implikasi bahwa institusi ‘gilda’ tidak memadai lagi, bahkan dianggap sebagai penghambat berkembangnya perdagangan antar negara waktu itu. Akibatnya, mereka melakukan perdagangan dengan berbagai negara hasil temuan mereka, dan semua ini menimbulkan persaingan dagang yang makin menajam antar bangsa penjelajah. Para ‘kapitalis pedagang’ (marchant capitalists) memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Emas, rempah-rempah, perak yang memberikan kemudahan bagi pesatnya perdagangan dan mendorong tumbuhnya teori mengenai logam mulia (Sastradipoera, 2001: 14).

Pada masa tersebut peran tokoh Thomas Mun (1571-1641) saudagar kaya raya dari Inggris dan Jean Baptist Colbert (1619-1683) adalah seorang menteri utama ekonomi dan keuangan dari Prancis pada zaman raja Louis XIV, merupakan dua tokoh penting yang mewakili kaum ‘skolar’ dan saudagar pada waktu itu, sehingga ekonomi merkantilisme ini sering disebut ‘Colbertisme’.

Inti ajaran/mazhab ini bahwa; *Pertama*, emas dan perak khususnya merupakan bentuk kekayaan yang paling banyak disukai, oleh karena itu mereka melarang ekspor logam mulia. *Kedua*, negara harus mendorong ekspor dan memupuk kekayaan dengan merugikan negara lainnya (tetangga). *Ketiga*, dalam kebijaksanaan ekspor-impor, berkeyakinan bahwa perkembangan harus dapat diraih dan dikelola dengan jalan meraih surplus sebesar-besarnya dari penerimaan ekspor barang yang melebihi belanja untuk impor barang. *Keempat*, kolonisasi dan monopolisasi perdagangan harus benar-benar dapat dilaksanakan secara ketat untuk memelihara keabadian kaum koloni tunduk dan tergantung kepada negara induk. *Kelima*, penentangan atas bea, pajak, dan restriksi intern terhadap mobilitas barang, *Keenam*, harus dibangun pemerintah pusat yang kuat, guna menjamin kebijaksanaan merkantilisme tersebut, dan. *Ketujuh*, pentingnya pertumbuhan penduduk yang tinggi namun disertai dengan sumberdaya manusia yang tinggi pula untuk memenuhi kepentingan pemasokan kepentingan militer serta pengelolaan merkantilisme yang kuat pula (Sastradipoera, 2001: 12-18).

Mazhab Fisiokrat, muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1756. Istilah “fisiokrat” berasal dari bahasa Yunani, dari kata “physis” berarti alam, dan “kratos” berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti “supremasi alam”. Tokohnya adalah Francois Quesnay (1654-1774), seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi

Raja Louis XV, juga dokter kepercayaan selir raja, Madame de Pompadour. Di samping profesinya sebagai dokter, ia seorang ahli ekonomi yang menulis artikelnya "ilmu ekonomi" dalam *Grande Encyclopedie*. Quesnay mengecam kebijaksanaan ekonomi Colbert, dengan mengatakan bahwa seorang menteri tidaklah pantas mengeluarkan kebijaksanaan hanya didorong oleh kecemburuan terhadap keberhasilan perdagangan Belanda dan keindahan industri barang-barang mewah. Hal ini hanya akan menjebloskan negara Prancis dalam kebodohan yang amat dalam, di mana rakyat hanya bisa bicara mengenai "dagang" dan "uang". Semuanya ini tidak lain hanya karena ulah Colbert yang telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi rakyat Prancis.

Inti ajaran fisiokrat ini pada hakikatnya berlandaskan hukum alam. Sebagaimana Isaac Newton (1643-1727) yang telah menemukan hukum dunia fisik, maka Quesnay percaya bahwa seluruh kegiatan manusia harus dibawa ke dalam harmoni dengan hukum alam. Intinya, *pertama*, Semboyan *laissez-faire, laissez-passer* yang berasal dari Vincent de Gournay (1712-1759) yang arti konotatifnya "biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campurtangan pemerintah" mengisaratkan betapa pemerintah harus membatasi diri dalam intervensinya dalam perekonomian jelas bertentangan dengan kaum merkantilis, maupun feodalis. *Kedua*, tekanan pada sektor pertanian yang produktif yang memungkinkan terjadinya surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. *Ketiga*, pemilik tanah harus dibebani pajak yaitu dalam bentuk satu macam pajak. Sekalipun perekonomian Prancis tidak menjadi lebih baik, namun fisiokrat telah memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan ilmu ekonomi, terutama dalam semboyan *laissez-faire*, fisiokrat mengubah perhatian para ekonom kepada masalah peranan pemerintah dalam perekonomian yang didasarkan pada persaingan bebas dan kebebasan memilih serta membuat keputusan (Sastradipoera, 2001: 21-27)..

Mazhab Klasik; mazhab ini secara umum mengacu kepada sekumpulan gagasan ekonomi yang bersumber dari formulasi David Hume, yang karya terpentingnya diterbitkan pada tahun 1752 dan munculnya seorang ekonom besar yang pernah menjadi Guru Besar Falsafah Moral di Universitas Glasgow, Adam Smith dengan karyanya *An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations* tahun 1776 sampai Ricardo, McCulloch John.Stuart. Mill, dan Lord Overstone (1837). Gagasan-gagasan kedua tokoh tersebut mendominasi ilmu ekonomi, khususnya yang mekar di Inggris, selama seperempat terakhir abad 18 dan tigaperempat pertama abad 19 (O'Brien, 2000: 120).

Inti mazhab klasik tersebut pada hakikatnya terletak pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui interaksi antara akumulasi modal dan pembagian kerja. Akumulasi modal dapat dilakukan dengan menunda atau mengurangi penjualan out-put dan hal ini baru akan bermanfaat jika dibarengi pengembangan spesialisasi dan pembagian kerja. Pembagian kerja itu sendiri nantinya akan dapat meningkatkan total out-put sehingga memudahkan dilakukannya akumulasi modal lebih lanjut. Jadi jelaslah bahwa antara kedua hal tersebut terdapat hubungan timbal-balik yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditingkatkan jika modal bisa ditambah, dan atau jika alokasi sumber daya (pembagian kerja) dapat disempurnakan. Namun pembagian kerja itu

sendiri dibatasi oleh ukuran atau skala pasar, yang pada gilirannya ditentukan oleh jumlah penduduk dan pendapatan perkapita yang ada. Tatkala modal terakumulasi, tenaga kerja akan kian dibutuhkan sehingga tingkat upah-pun meningkat untuk memenuhi kebutuhan "subsisten" baik secara psikologis maupun fisiologis (O'Brien, 2000: 121). Ilmu ekonomi klasik tersebut merupakan prestasi intelektual yang mengesankan. Landasan-landasan teoretis yang dikembangkannya menjadi pijakan bagi teori-teori perdagangan dan moneter sampai sekarang ini.

Mazhab Sosialisme. Dalam mazhab sosialisme ini sistem pemilikan dan pelaksanaan kolektif atas faktor-faktor produksi (khususnya barang-barang modal), biasanya oleh pemerintah. Ide-ide sosialis dan gerakan politik mulai berkembang pada awal abad ke-19 di Inggris dan Prancis. Periode antara tahun 1820-an sampai 1850-an ditandai dengan pletoria beragam sistem sosialis yang diusulkan oleh Saint-Simon, Fourier, Owen, Blanc, Proudhon, Marx dan Engels, serta banyak lagi pemikir sosialis lainnya. Kebanyakan sistem/mazhab ini bersifat utopia dan sebagian besar pendukungnya adalah para 'filantropis' (cinta kasih sesama umat manusia) kelas menengah yang memiliki komitmen untuk memperbaiki kehidupan para pekerja/buruh serta kaum miskin lainnya. Selain itu kebanyakan penganut sosialis mendambakan masyarakat yang lebih terorganisir yang akan menggantikan anarki akibat dari pasar dan kemiskinan masalah masyarakat perkotaan (Hirst, 2000: 1012).

Inti ajaran atau mazhab sosialis sebenarnya sulit dijelaskan karena luasnya cakupan sosialisme (sosialisme utopis, sosialisme ilmiah, sosialisme negara, sosialisme anarkis, sosialisme revisionis, sosialisme serikat sekerja, dan sebagainya).

Mereka yang membela sosialisme acapkali berbeda mengenai jenis sosialisme yang mereka cari. Hanya dalam beberapa hal mereka mempunyai kesamaan, selebihnya berbeda bahkan bertentangan. Ada yang menghendaki hapusnya pemerintah, sementara yang lainnya ingin mempertahankan agar dapat melindungi kepentingan buruh; ada pula yang menganggap semua lambang kapitalisme harus dilenyapkan, termasuk mekanisme pasar, harga, dan *invisible hand*, sedangkan yang lainnya menganggap mekanisme pasar dan harga masih diperlukan dalam saat-saat awal sosialisme disebabkan sulitnya mengukur efisiensi ketika dewan perencanaan pusat menyusun prioritas (Sastradipoera, 2001: 40).

Sedangkan *mazhab historis*, yang lahir di Jerman tahun 1840-an melalui karya ilmiah yang ditulis oleh Friederich List (1789-1846) dalam *Nationales System der politischen Oekonomie* (1840), dan Wilhelm Roscher (1817-1894) dalam *Grundriss zu Vorlesungen ueber die Staatswissenschaft nach geschichtlicher Methode* (1843), menyerang mazhab klasik Inggris. Mereka beranggapan bahwa konsep-konsep ekonomi sesungguhnya merupakan produk perkembangan menurut sejarah kehidupan ekonomi yang khusus tumbuh di suatu negara. Oleh karena itu hukum-hukum ekonomi tidaklah mutlak, tetapi bersifat

relatif atau nisbi berhubungan dengan perkembangan sosial menurut dimensi waktu dan tempat.

Kemudia *mazhab marjinalis*. Mazhab ini pelopornya adalah Karl Menger (1840-1921) dari Jerman dalam karyanya *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre* (1871). Selanjutnya seorang ekonom Inggris William Staley Jevons (1835-1882) dalam karyanya *Theory of Political Economy* (1871), dan seorang Prancis Leon Walras (1834-1910) dalam karyanya *Elements d'économie politique pure* (1874). Mereka memberikan analisis yang telak mengenai hubungan antara kebutuhan dan harga dengan mengacu kepada konsep "guna marjinal". Mereka menegaskan bahwa dalam hal seseorang individu, setiap tambahan suatu barang yang dilakukan secara berturut-turut akan memperkecil nilai obyektif setiap tambahan yang dimiliki oleh individu itu. Oleh karena itu gagasan yang tidak sistematis mengenai nilai pakai dan permintaan serta penawaran sebagai penentu nilai tukar barang (yang dikembangkan bersamaan dan bertentangan dengan teori Klasik), menemukan penanganansistematis pada awal tahun 1970-an oleh ketiga penulis di atas (Sastradipoera, 2001: 62).

Mazhab institusionalis, datang dari Amerika Serikat tahun 1900-an yang pengaruhnya masih kuat sampai sekarang ini, contohnya adanya undang-undang anti-trust yang masih dipertahankan. Tokohnya adalah Thorstein Veblen (1857-1929) dalam karyanya *The Theory of the Leisure Class* pada tahun 1899. Veblen dikenal sebagai seorang kritikus sosial yang bersemangat serta menyerang organisasi masyarakat industri kontemporer yang dianggapnya boros, dan mengalahkan sikap konsumtif yang menyolok mata. Selanjutnya ia mengamati sudut-sudut yang merugikan yang berasal dari gejala yang dihadapinya; "milik guntay" (absentee ownership) yang merupakan ciri utama kapitalisme finansial. Berasal dari "milik guntay" maka muncullah suatu lapisan masyarakat yang dianggap oleh Veblen sebagai "kelas santai" (*leisure class*), adalah suatu kelas pada masyarakat lapisan atas yang berasal dari dunia industri dan keuangan yang perilkunya menampakkan fenomena kaum "feodal tanggung" dengan mempertontonkan pola konsumsi yang berlebihan serta mencolok mata (Sastradipoera, 2001: 72).

Mazhab neo klasik; merujuk pada versi terbaru dari ekonomi klasik yang dimunculkan pada abad 19 terutama oleh Alfred Marshal dan Leon Walras. Versi-versi yang terkenal itu dikembangkan pada abad ke-20 oleh John Hicks (1946[1939]) dan Paul Samuelson (1965[1947]). Lepas dari pengertian neo klasik umumnya, perbedaan ekonomi neo klasik dan klasik hanya terletak pada penekanan dan pusat perhatiannya. Jika ekonomi klasik menjelaskan segala kondisi ekonomi dalam kerangka kekuatan-kekuatan misterius "*invisiblehand*" (tangan-tangan tak terlihat), maka dalam mazhab ekonomi neo klasik mencoba memberi penjelasan lengkap dengan memfokuskan pada mekanisme-mekanisme aktual yang menyebabkan terjadinya kondisi ekonomi tersebut (Boland, 2000: 700).

Selanjutnya adalah *mazhab Keynesian*; Mazhab ini sesuai dengan namanya dipimpin oleh John Maynard Keynes, yang merupakan ekonomi agregat (makro) yang dituangkan dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), dan dari karya-karya pengikut Keyneu yang lebih kontemporer

seperti Sir Roy Harrold, Lord Kaldor, Lord Kahn, Joan Robinson dan Michael Kalecki, yang meluaskan analisis Keynes terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertanyaan mengenai distribusi fungsional pendapatan (*functional distribution of income*) antara upah dan laba yang oleh Keynes sendiri dibaikan (Thirwall, 2000: 531). Dua pilar utama dari teori employment klasik adalah bahwa tabungan dan investasi menghasilkan ekuilibrium pada tingkat *full employment* melalui tingkat suku bunga, dan bahwa penawaran serta permintaan tenaga kerja menghasilkan ekuilibrium melalui berbagai variasi upah riil. General Theory Keynes ditulis sebagai reaksi terhadap paham klasik tersebut. Perdebatan mengenai masalah ini sampai sekarang masih berlangsung.

Mazhab Chicago, merupakan aliran kontrarevolusi neoklasik yang menentang institusionalisme dalam metodologi ilmu ekonomi, makroekonomi ala Keynes maupun terhadap liberalisme abad 20 yang menonjolkan intervensionisme dan penonjolan kebijakan ekonomi oleh pemerintah (Bronfendbrenner, 2000: 103). Sesuai dengan namanya, aliran ini berkembang di Universitas Chicago sejak dekade 1930-an. Tokoh utamanya tahun 1950-an adalah Frank H. Knight untuk soal teori dan metodologinya, serta Henry C. Simons dalam rumusan kebijakan ekonomi. Kemudian pada generasi berikutnya tokoh yang menonjol adalah Milton Friedman, George Stigler dan Gary Becker. Jika dilihat dari sudut sejarahnya pemikiran ekonomi mazhab Chicago ini sebenarnya adalah suatu varian Neoklasisme dan mengacu kepada "Klasisisme Baru (New Classicism), di mana;

Pertama, pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, asalkan didukung kebebasan politik intelektual; para ekonom aliran Chicago melihat perekonomian sebagai suatu kondisi perlu, namun bukan kondisi cukup untuk menciptakan masyarakat bebas; *Kedua*; pengelolaan administratif dan intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat *ad hoc*, hanya akan merusak situasi ekonomi; dalam soal kebijakan moneter dan fiskal, aliran ini menekankan pentingnya kesinambungan. *Ketiga*; moneterisme dianggap lebih baik ketimbang fiskalisme dalam regulasi makroekonomi. *Keempat*; kebijakan fiskal diyakini sebagai wahana yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan, namun redistribusi pendapatan bagi kalangan di atas garis kemiskinan justru akan lebih banyak menimbulkan kerugian.

D. Konsep-konsep Ilmu Ekonomi

Beberapa konsep dalam ilmu ekonomi, seperti; (1) skarsitas, (2) produksi, (3) konsumsi, (4) investasi, (5) pasar, (6) uang, (7) *letter of credit* (LC), (8) neraca pembayaran, (9) bank atau perbankan, (10) koperasi, (11) kebutuhan dasar, (12) kewusahaan, (13) perpajakan (14) periklanan (15) perseroan terbatas, (16) laba (17) Kurs atau nilai tukar.

1. *Skarsitas*

“Skarsitas” atau “kelangkaan” adalah sebuah prinsip bahwa sebagian besar barang yang diinginkan orang hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas (kecuali seperti barang bebas seperti udara). Dengan demikian barang umumnya dalam keadaan langka dan harus dijatah, baik melalui mekanisme harga maupun cara lainnya (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 535).

Dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial lainnya, kelangkaan juga melahirkan teori stratifikasi sosial dalam sejarah perkembangan manusia. Teori skarsitas (kelangkaan) merupakan devisa pemikiran Michael Harner (1970), Morton Fried (1967) dan Rae Lesser Blumberg (1978). Teori ini beranggapan bahwa penyebab utama timbul dan semakin intensnya stratifikasi sosial disebabkan oleh tekanan jumlah penduduk. Tekanan jumlah penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap sumber daya yang menyebabkan masyarakat baik pemburu dan peramu pola subsistensi pertanian. Pertanian akhirnya menggantikan pola subsistensi pemburu dan peramu. Sebut saja “komunisme primitif” dalam masyarakat pemburu dan peramu merupakan cikal bakal pemilikan tanah oleh keluarga besa, namun pemilikan masih bersifat komunal daripada pribadi.

Makin meningkatnya tekanan jumlah penduduk, mengakibatkan masyarakat holtikultura makin memperhatikan pemilikan tanah serta makin kokohnya jiwa “egoisme” pribadi sehingga menghilangkan apa yang disebut sebagai “pemilikan bersama”. Di samping itu perbedaan akses terhadap sumber daya muncul, dari suatu individu maupun kelompok muncul memaksa individu maupun kelompok lainnya yang memaksa bekerja lebih keras untuk menghasilkan surplus ekonomi melebihi apa yang dibutuhkan sampai terbentuknya kelompok yang bersenang-senang atau *leisure class* (Sanderson, 1995: 161). Dengan demikian dalam teori kelangkaan tersebut tertanam kebiasaan persaingan maupun konflik materialistik

2. *Produksi*

“Produksi” dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas “produksi” adalah segala usaha untuk menambah atau mempertinggi nilai atau faedah dari sesuatu barang. Sedangkan dalam arti sempit “produksi” adalah segala usaha dan aktivitas untuk menciptakan suatu barang atau mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain (Abdullah, 1992: 4; 38).

Misalkan seorang petani berusaha untuk menghasilkan padi atau beras melalui usaha bertani, hal ini dapat diklasifikasikan “produksi” dalam pengertian sempit. Jika jumlah padi atau beras yang dihasilkan di tempat petani tersebut berlimpah bila dibandingkan dengan keperluan konsumsinya, maka beras atau padi tersebut nilai atau faedahnya akan rendah. Dalam hal ini kemudian para pedagang berusaha membawa limpahan beras tersebut ke tempat baru yang memiliki nilai faedah yang lebih tinggi. Untuk aktivitas yang terakhir ini dapat digolongkan “produksi” dalam arti luas.

Suatu aktivitas “produksi” tidak akan berjalan tanpa melalui “proses produksi”. Sebab sesuatu produksi tidaklah terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui tahapan suatu proses yang cukup panjang. Proses produksi adalah suatu proses atau kegiatan untuk memperoleh alat-alat pemuas kebutuhan, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Jadi tujuan pokok dari produksi adalah untuk konsumsi. Bila jarak produsen dengan konsumen berjauhan maka diperlukan adanya usaha-usaha untuk menyempaiannya kepada konsumen. Usaha-usaha untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen tersebut dinamakan proses “distribusi” (Abdullah, 1992: 4; 38).

Terdapat empat macam faktor produksi, yakni (1) alam; (2) tenaga kerja; (3) modal; (4) *skill* atau keterampilan. *Faktor alam*, mencakup; tanah dan keadaan iklim, kekayaan hutan, kekayaan kandungan tanah (mineral), kekayaan air sebagai sumber penggerak transportasi maupun sumber pengairan dalam pertanian. *Faktor produksi tenaga kerja* adalah peranan manusia dalam proses produksi. *Faktor produksi modal*, adalah adalah semua barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam produksi untuk masa depan. Barang-barang tersebut kadang-kadang disebut sebagai barang-barang produksi dan kadang-kadang disebut investasi maupun barang modal, seperti mesin-mesin, gedung-gedung, dan instalasi pabrik. Sedangkan *faktor produksi skill* atau keterampilan merupakan beberapa jenis kecakapan atau keterampilan khusus yang diperlukan dalam proses produksi ekonomi. Adapun cakupan skills yang dimaaksud meliputi *managerial skills*, *technological skills*, dan *organizational skills* (Abdullah, 1992: 41).

3. *Konsumsi*

Secara sederhana pengertian “konsumsi” adalah segala tindakan manusia yang dapat menimbulkan turunnya atau hilangnya “faedah atau guna” sesuatu barang. Pengertian tersebut dapat dibandingkan dengan Samuelson dan Nordhaus (1990: 161) bahwa “konsumsi” adalah sebagai pengeluaran untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, mobil, pengobatan, dan perumahan. Jadi pengertian tersebut jelas berbeda dengan pemahaman yang hidup di masyarakat bahwa pemahaman ‘konsumsi’ selalu inheren dengan ‘makanan’.

Seseorang konsumen akan bersedia membeli sesuatu barang, karena barang itu sangat berguna baginya. Begitu juga terhadap jasa, seseorang akan membayar suatu jasa karena jasa tersebut sangat bermanfaat baginya. Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa seseorang akan bersikap berbeda-beda melihat penting tidaknya sesuatu barang ataupun jasa sesuai dengan keperluannya yang berbeda-beda pula. Menurut para ahli ekonomi yang mengembangkan pendekatan dengan fungsi kegunaan dalam permintaan konsumen ini berpendapat bahwa kegunaan sesuatu barang dapat diukur secara kardinal — yaitu dengan cara membandingkannya dengan tingkat kegunaan dari barang-barang yang lainnya (Abdullah, 1992: 35)

Dengan demikian pada umumnya setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap bermacam-macam barang adalah secara seimbang. Di sinilah sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya orang dengan sadar atau tidak akan menggunakan prinsip ekonomi. Artinya ia akan berusaha untuk mencapai tingkat konsumsi yang paling menguntungkan baginya. Dengan demikian pula konsumen dalam melakukan konsumsinya bertujuan untuk mencapai kepuasan dan kegunaan setinggi-tingginya melalui pemikiran yang se rasional mungkin. Idealnya seorang konsumen akan

mempertimbangkan; (1) jumlah pendapatannya, (2) daftar preferensi dari jenis barang yang akan dikonsumsi; (3) harga persatuan tiap jenis barang yang akan dikonsumsi; (4) jumlah tiap jenis barang yang akan dikonsumsi (Abdullah, 1992: 37).

4. Investasi

“Investasi” dapat diartikan sebagai perubahan stok modal dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun buku (Mullineux, 2000: 522). Makna “investasi” tersebut sering dikacaukan dengan investasi keuangan (*financial investment*) yang definisinya adalah pembelian aset-aset keuangan seperti saham dan obligasi yang nantinya akan akan dijual kembali begitu harganya meningkat, dan hal itu lebih terkait dengan analisis jasa. “Investasi” juga berbeda dari “investasi inventori”, yakni penyimpanan atau perubahan stok produk final, produk setengah jadi, atau bahan-bahan mentah. Begitu-pun barang-barang investasi modal (*capital investment goods*) berbeda dari barang konsumsi, karena hal itu dapat menghasilkan arus jasa selama periode tertentu, dan jasa itu tidak langsung memenuhi kebutuhan konsumen. Namun demikian sangat diperlukan untuk produksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua-duanya agak mirip, karena sebagian barang konsumen (yakni durable goods atau berbagai barang yang bisa dipakai berkali-kali / bisa dimanfaatkan dalam waktu lama) dapat juga dikategorikan sebagai barang investasi.

Pembedaan investasi juga dapat juga dibedakan atas dasar lembaganya, ada dua yaitu yang dilakukan atas dasar *investasi publik* (dilakukan pemerintah), dan investasi yang dilakukan oleh *badan-badan swasta*. Selain itu investasi juga dapat dibedakan berdasarkan tempatnya yang terbagi atas dua macam, yaitu; ada *investasi domestik* dan ada pula *investasi asing*. Sedangkan pembedaan yang berdasarkan jenis barangnya, investasi dapat digolongkan menjadi dua pula yaitu *investasi langsung* (seperti pengadaan pabrik, peralatan, dan berbagai sarana produksi), dan *investasi keuangan* atau *portofolio* seperti; obligasi dan saham (Mullineux, 2000: 522)

5. Pasar

“Pasar” adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa (Samuelson dan Nordhaus: 2003; 29). Dengan demikian pasar pada hakikatnya juga merupakan keseluruhan permintaan dan penawaran barang serta jasa. Walaupun sepintas kelihatannya seperti sebuah kumpulan campur-baurnya penjual dan pembeli yang membingungkan dan merupakan mekanisme yang rumit, namun sistem ini merupakan suatu alat komunikasi untuk menyatukan pengetahuan dan tindakan-tindakan dari jutaan individu yang berbeda untuk proses pemenuhan kebutuhan.

Jika ditinjau dari macam atau jenisnya, pasar dapat dibedakan berdasarkan; *Pertama*; jika dilihat dari *barang-barang yang diperjual-belikannya*, dapat dibedakan antara pasar *barang konsumsi* dan pasar *faktor produksi*. *Kedua*, jika dilihat dari *waktu terjadinya*, dapat dibedakan antara pasar harian, pasar mingguan, dan bulanan. Sementara itu untuk pasar tahunan biasanya dikalsanakan

dalam bentuk pekan raya. *Ketiga*, jika dilihat dari *lingkup aktivitasnya*; dapat dibedakan ada pasar local, nasional, maupun internasional. *Keempat*, jika dilihat dari *strukturnya*; dapat dibedakan antara pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik.

6. Uang

John Maynard Keynes (1883-1946) seorang ekonom neo-klasik dalam bukunya *Treaties on Money* (1930) mendefinisikan “*money [is] that by delivery of which debt-contract and price-contracts are discharged, and in the shape of which a store of General Purchasing Power is held*”, yaitu uang adalah alat penyelesaian kontraktual, dan sebuah *store of value*, sebuah wahana *purchasing power* yang bergerak dalam lintasan waktu. Dengan demikian uang secara umum dilihat dari fungsinya dapat didefinisikan sebagai alat tukar (Komaruddin, 1991: 397-398). Uang juga berfungsi sebagai sebagai satuan ukuran (*standard for valuing things*) maupun memiliki fungsi turunan (seperti sebagai standard perincian utang atau *standard deferred payments*, dan sebagai alat penyimpanan kekayaan).

Namun jdalam perkembangannya, uang juga merupakan alat untuk menjalankan kekuasaan ekonomi. Justru oleh karena uang memberikan hak kekuasaan abstrak atas dasar-dasar dan jasa-jasa, maka pada umumnya manusia ingin memiliki uang. Uang berarti kekuasaan; pada sebuah masyarakat yang berlandaskan dasar individualistic, uang menjadi alat kekuasaan dalam tangan pemiliknya (Winardi, 1987: 35). Bahkan jauh sebelumnya seorang begawan sosiolog yang dipengaruhi filsafat historisme Wilhelm Dilthey yakni Max Weber (1864-1920) dalam karyanya *General Economic History* (Knight. 1961), pernah mengemukakan bahwa “uang adalah ayahnya partikelir”. Uang akan menjadi cikal-bakal milik swasta, tentu saja setelah melewati proses pembentukan harga dan pembentukan kekuasaan.

Dalam keadaan ekstrim, terlihat suasana yang memprihatinkan “*Uang yang semula hanya merupakan alat, berubah menjadi tujuan, dari benda yang harus mengabdikan ia dapat berubah menjadi penguasa*” (Winardi, 1987: 42). Ini adalah suatu gambaran yang menakutkan akan fenomena “pemujaan uang”. Apakah pasti semuanya berdampak negatif tentang uang? Ternyata tidak selalu begitu, sebab uang juga memiliki “sifat sosial — ekonomi”. Karena melalui uang yang merupakan bagian pokok dari sesuatu masyarakat, juga telah berperan atas lalu-lintas pertukaran dan perdagangan, serta perindustrian. Ia dapat diberikan cuma-cuma maupun dipinjamkan ke orang lain yang membutuhkan melalui peminjaman kredit, ia dapat memungkinkan adanya pembentukan modal yang setiap saat dapat dialihkan bentuknya berupa barang-barang.

7. Letter of Credit

“*Letter of Credit*” (L/C) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut (Amir, 1996: 1). Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) aatas Bank

Pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menhonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu.

Adpun peranannya L/C tersebut dalam perdagangan internasional untuk: (1) untuk memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor; (2) untuk mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor; (3) untuk menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Perlu diketahui bahwa dalam praktiknya antara eksportir dan importir itu terpisah baik secara geografis maupun geo-politik. Bahkan tidak mustahil antara eksportir dan importir secara pribadi saling tidak mengenalnya. Sebab bagi eksportir merupakan risiko besar jika mengirimkan barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena untuk mendapatkan jaminan tersebut, eksportir meminta kepada importir agar membuka *Letter of Credit* untuknya. Dan L/C inilah yang merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirimkan oleh eksportir.

Dengan demikian untuk kepentingan eksportir L/C harus dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Begitu juga sebaliknya, pembukaan L/C merupakan jaminan pula untuk importir bersangkutan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan yang diinginkannya. Sedangkan dana L/C tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Letter of Credit merupakan suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu-lintas pembiayaan dalam transaksi perdagangan internasional (Amir, 1996: 2).

8. Neraca Pembayaran

“Neraca pembayaran” (*balance of payments*) adalah keseluruhan catatan akuntansi dari transaksi-transaksi internasional suatu negara dengan negara lainnya (Thirlwall, 2000: 58). Penerimaan valuta asing dari penjualan barang dan jasa disebut ekspor dan sebagai item kredit dalam apa yang disebut neraca transaksi berjalan (*current account*) yang merupakan salah satu bagian dari neraca pembayaran. Sedangkan pembayaran valuta asing untuk pembelian barang-barang dan jasa disebut impor dan muncul sebagai item *debet* dalam neraca berjalan. Selain itu juga perlu diketahui bahwa ada transaksi-transaksi dalam modal yang muncul sebagai neraca modal terpisah. Arus keluar modal (*capital outflows*) adalah transaksi untuk membiayai aktivitas permodalan internasional seperti penanaman modal di luar negeri, misalnya, dan diperlukan sebagai *debet*, sedangkan arus masuk modal (*capital inflows*) adalah sebaliknya dan diperlukan sebagai *kredit*.

Namun dalam hal ini defisit pada negara berjalan bisa diseimbangkan atau ditutupi dengan surplus pada neraca modal dan demikian juga sebaliknya. Mengingat nilai tukar valuta asing adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lain, total kredit (suplai valuta asing) dan *debet* (permintaan valuta asing) harus sama jika nilai tukar dibiarkan berfluktuasi bebas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan valuta asing. Namun demikian, jika nilai tukar tidak bebas bergerak, maka defisit atau surplus akan meningkat. Defisit bisa dibiayai dengan pinjaman pemerintah dari bank-bank dan lembaga keuangan

Internasional Monetary Fund, atau dengan menarik sebagian cadangan emas devisnya. Surplus bisa dimanfaatkan dengan memperbesar cadangan atau dipinjamkan ke luar negeri (Tirlwall, 2000: 57).

Terdapat tiga pendekatan utama dalam penyesuaian neraca pembayaran yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi, khususnya berkenaan dengan bagaimana cara memandang defisit. *Pertama*, pendekatan *elastisitas*; yang melihat defisit sebagai hasil distorsi harga relatif dalam hal ini disebabkan kurangnya kompetisi pasar. Di sini penyesuaian seyogyanya dilakukan melalui depresiasi nilai tukar sesuai dengan nilai elastisitas harga permintaan untuk kelebihan unit impor dan ekspor. *Kedua*, pendekatan *absorpsi*, yang melihat defisit sebagai akibat dari kelebihan pembelanjaan atas output domestik, sehingga penyesuaian yang baik adalah menurunkan pembelanjaan secara relatif terhadap output. *Ketiga*, pendekatan *moneter*, yang memandang defisit sebagai suatu kelebihan suplai uang relatif terhadap permintaan, sehingga penyesuaian hanya bisa berhasil jika permintaan uang bisa dinaikan secara relatif terhadap suplainya. (Tirlwall, 2000: 57).

9. Bank (Perbankan)

Istilah “bank” mempunyai arti yang sebenarnya dan sudah berakar khususnya pada masyarakat Eropa bermakna “meja” atau “kounter”. Pengertian “meja” yang dimaksud adalah “meja” yang sering dipakai tempat penukaran uang di pasar pada Abad Pertengahan dan bukan “meja” yang dipakai oleh para “lintah darat” (Revel, 2000: 60). Pada mulanya bank-bank yang ada pada masa lalu itu acapkali bermula sebagai usaha yang disubsidi oleh para pedagang, awak kapal, pedagang ternak, dan belakangan ini para agen perjalanan. Ada pula bank-bank yang muncul dari bisnis perhiasan emas yang beberapa di antaranya disubsidi oleh para dermawan. Namun setelah dua abad lebih, perbankan berkembang menjadi sector perdagangan mandiri, dan muncul berbagai perusahaan dan rekanan yang menjalankannya sebagai bisnis yang tersendiri (Revel, 2000: 58).

Salah satu hukum yang berlaku dalam bank adalah menerima tabungan uang dan memberikan pinjaman dengan mengambil keuntungan, kendati dalam hal-hal tertentu tabungan dan pinjaman dibatasi dalam waktu relatif pendek maupun menengah. Secara keseluruhan fungsi bank utama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menghimpun dana-dana yang dimiliki masyarakat.
2. Menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk kredit.
3. Memperlancar kegiatan perdagangan dan arus lalu-lintas uang antara para pedagang (Abdullah, 1992: 216).

Di balik fungsi itu juga bank melakukan tugas-tugas lainnya seperti (1) menciptakan uang; (2) melakukan inkaso. Untuk tugas menciptakan uang tersebut, sebetulnya terdapat variasi. Bank sentral dapat menciptakan uang, baik *uang kartal* dan *uang giral*. Sedangkan di luar bank sentral (bank sekunder) hanya boleh menciptakan uang *giral*.. Sedangkan untuk tugas-tugas melakukan inkaso, hal ini dilakukan mengingat perdagangan dewasa ini semakin kompleks dan

melampaui batas-batas suatu negara. Di sinilah para pedagang besar umumnya memilih menggunakan jasa bank dalam membayar atau menagih hasil transaksi dagangnya. Umumnya pedagang yang demikian menggunakan alat pembayaran berupa cek atau giro yang ditagih dari bank atau dipindahbukukan pada rekening nasabah yang bersangkutan. Pekerjaan bank yang berkaitan dengan membayar dan menagih untuk atau atas nama pihak lain seperti dijelaskan di atas, dinamakan sebagai fungsi bank selaku *inkaso*.

10. Koperasi

“Koperasi” adalah sebuah gerakan ekonomi maupun sebagai badan usaha (Chaurmain dan Prihatin, 1994: 364). Sebagai gerakan ekonomi, koperasi mempersatukan sejumlah orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dan sepakat bahwa kebutuhan bersama itu akan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan diawasi, serta dipertanggungjawabkan secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Sedangkan sebagai badan usaha milik bersama, koperasi merupakan sebuah badan yang bertujuan melakukan usaha pemenuhan kebutuhan bersama seluruh anggota

Jika ditilik sejarah perkembangannya, koperasi pertama dibentuk pada tahun 1844 di Toad Lane, Rochdale oleh 28 pekerja Lancashire yang selanjutnya mengembangkan tujuh prinsip koperasi yang samapai sekarang masih menjadi landasan gerakan koperasi di seluruh dunia, walaupun tidak sepenuhnya mendapat penekanan yang sama. Ketujuh prinsip tersebut adalah; (1) keanggotaannya bersifat terbuka; (2) satu anggota satu suara; (3) perputaran modal terbatas; (4) alokasi surplus produksi disesuaikan atau kontribusi dari masing-masing anggota; (5) jasa penyediaan uang tunai; (6) penekanan pada aspek pendidikan; (7) bersifat netral dalam soal agama dan politik (Estrin, 2000: 176).

Di Indonesia azas koperasi diataur dalam undang-undang perkoperasian di mana azasnya selalu kekeluargaan dan gotong-royong. Ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya yang menghilangkan profisiensi-sya. Sedangkan jika ditilik jenis-jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan; *Pertama*; lapangan usaha, meliputi *koperasi konsumsi* (koperasi pemenuhan kebutuhan barang-barang untuk anggota) dan *koperasi produksi* yang memproduksi untuk disalurkan ke para anggotanya (seperti; koperasi kerajinan tangan, pertanian, perindustrian dan simpan-pinjam; *Kedua*; koperasi menurut lingkungannya, dapat dibedakan menjadi *koperasi fungsional* yang sering dibentuk di kantor tempat para anggotanya bekerja, kemudian *koperasi unit desa* yang tersebar di desa-desa, serta *koperasi sekolah* yang tersebar di bebarapa sekolah.

11. Kebutuhan Dasar

Konsep “kebutuhan dasar” telah memainkan peran penting dalam analisis kondisi-kondisi khususnya di negara miskin dan berkembang. Drenowski dan Scott (1966) mengemukakan bahwa istilah “kebutuhan dasar” memiliki riwayat yang panjang. Dan, menurut Townsend (2000: 61) mulai dipakai secara luas sejak Konperensi Tenaga Kerja Dunia (ILO) yang berlangsung di Jenewa tahun 1976,

yang mengemukakan bahwa bahwa kebutuhan dasar itu memiliki dua unsur: *Pertama*, meliputi jumlah minimum tertentu yang dibutuhkan oleh suatu keluarga untuk konsumsi pribadi, meliputi; *makanan, perumahan, sandang*, serta *perabot dan peralatan rumah tangga*. *Kedua*; kebutuhan dasar juga meliputi layanan-layanan pokok yang disediakan oleh dan untuk komunitas secara keseluruhan, seperti; *kesehatan, pendidikan, air minum yang aman, sanitasi, angkutan umum, dan fasilitas-fasilitas budaya*.

Konsep “kebutuhan dasar” tersebut diakui memang mendapat tempat yang penting dalam perdebatan yang berlangsung terutama dalam hubungannya antara Dunia Pertama dengan Dunia Ketiga. Menurut Townsend (2000: 62).

Semakin diakui aspek-aspek sosial dari konsep itu, semakin perlu pula diakui relativitas kebutuhan atas sumber-sumber daya dunia dan nasional. Semakin konsep itu dibatasi kepada barang-barang dan fasilitas-fasilitas fisik, semakin gampang orang berpendapat bahwa yang diperlukan adalah pertumbuhan ekonomi saja, bukannya kombinasi yang kompleks dari pertumbuhan, pemerataan dan penataan perdagangan dan hubungan-hubungan institusional lainnya.

12. Kewirausahaan

Konsep “kewirausahaan” atau “*entrepreneurship*” merujuk kepada suatu sifat keberanian, keutamaan dan dalam mengambil risiko dalam kegiatan inovasi (Samuelson dan Nordhaus, (1990: 518; Casson, 2000: 297; Abdullah, 1992: 128). Dari kata *entrepreneur* tersebut maka muncullah tafsiran yang beragam, seperti; *merchant* (pedagang), “pemilik usaha”, sampai “petualang”. Dan, orang yang mempopulerkan istilah/konsep tersebut adalah John Stuart Mill (1948) di Inggris.

Menurut Schumpeter, para wira usaha adalah penggerak atau motor ekonomi, karena fungsi inovasi yang mereka jalankan menduduki tempat sentral. Terdapat lima tipe inovasi yang menonjol; (1) pengenalan barang baru atau barang lama dengan mutu lebih baik; (2) penemuan metode produksi yang baru; (3) pembukaan pasar yang baru, khususnya untuk ekspor; (4) perolehan sumber pasokan bahan baku yang baru; (5) penciptaan organisasi industri yang baru, misalnya pembentukan jaringan usaha terpadu yang bisa beroperasi monopoli (Casson, 2000: 297). Namun demikian wirausahaawan bukan “penemu” murni, dia hanya yang pertama kali memanfaatkan penemuan tersebut, dan mempertaruhkan sumberdayanya sendiri untuk mencapai suatu usaha yang tak terbayangkan oleh orang lain. Tetapi bukan pula seorang wirausahawan menjadi “penjudi risiko minimal”. Karena keputusan-keputusan yang diambilnya juga penuh perhitungan melalui proses-proses manajerial yang teruji. Oleh karena itu seorang wirausaha menurut Casson adalah sebagai yang berspesialisasi dalam membuat keputusan, karena dia memiliki akses khusus dalam memperoleh informasi (1982).

1. Perpajakan

Konsep “perpajakan” mengacu kepada suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan

dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa, untuk kepentingan umum, yang sekaligus sebagai sumber pendapatan negara (Brown, 2000: 1082).

Di kalangan negara-negara maju, rata-rata pajak menduduki seperlima sampai setengahnya dari GDP. Contohnya di Swedia sampai setengah dari GDP. Selandia Baru mengalami peningkatan 61%. Di sini diasumsikan bahwa besarnya pendapatan pajak bagi negara telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memungkinkan pemerintah menentukan sendiri bagaimana mencapainya. Menurut Brown (2000: 1082-1083) terdapat tiga peranan pajak dalam masyarakat; (1) efek alokatif, (2) efek distributif, (3) efek administratif.

Pertama, efek alokatif; bahwa pajak mempengaruhi perilaku warga. Artinya bahwa dengan adanya pentuan besar/kecilnya seseorang sebagai obyek pajak, akan memiliki pengaruh terhadap perilaku warga masyarakatnya. Sebagai contoh karena dia tahu bahwa dalam setiap pembelian barang pasti dikenakan pajak pembelian barang, maka dia akan hati-hati dalam membeli barang, atau tidak dengan serta merta ia akan membeli barang. *Kedua*, efek distribusional. Artinya bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Sebagai contoh buat apa "kerja lembur" banyak-banyak jika PPh-nya cukup tinggi? *Ketiga*, efek administratif. Di sini diartikan bahwa memungut pajak mengakibatkan munculnya biaya-biaya baik pada sektor publik maupun swasta yang bervariasi. Contohnya di Indonesia ketika kita akan membayar pajak kendaraan ironisnya justru orang-orang yang "bijak" sering menjadi korban pemerasan. Salah satu penentu utama biaya administratif adalah kompleksitas hukum, yang ironisnya jika hal ini dibiarkan dapat mengurangi kesadaran hukum bagi warga untuk bayar pajak kendaraan tepat waktu.

2. Periklanan

Istilah "periklanan" mengacu pada suatu komunikasi pasar yang dilakukan para penjual barang dan jasa. Pada mulanya yang paling banyak memperhatikan bidang ini adalah para ekonom, dan pembahasannya didasarkan pada konsep kunci informasi dalam konteks struktur pasar di tingkat lokal maupun nasional (Jhally, 2000: 7).. Walaupun sudah banyak penelitian empiris dilakukan untuk melihat efektivitas periklanan dalam meningkatkan permintaan produk (baik iklan yang sifatnya individual maupun untuk pasar secara keseluruhan). Namun keseluruhan penelitian itu tidak bisa menyimpulkan secara tegas seberapa efektif periklanan itu dari segi ekonomi (Albion dan Faris, 1981).

Terdapat beberapa peneliti tentang peranan iklan dalam perekonomian. Stuart Owen dalam karyanya *Captains of Consciousness* (1979) periklanan memiliki fungsi kembar terhadap kapitalisme, (1) menciptakan permintaan untuk menampung kapasitas barang-barang industri, (2) mengalihkan perhatian dari konflik kelas di tempat kerja dengan mendefinisikan identitas menurut konsumsi, bukan produksi. Kemudian teoretisi budaya Raymond Williams (1980) menambahkan bahwa periklanan merupakan sebuah "sistem sihir" yang menjauhkan perhatian orang dari sifat kelas dalam masyarakat dengan menekankan konsumsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "periklanan" dilihat sebagai suatu lokomotif utama dalam penciptaan *kebutuhan semu*.

Bahkan sekarang ini telah terjadi pergeseran di mana periklanan tidaklah semata-mata bernuansa ekonomi tetapi merambah ke bidang-bidang lainnya. Leiss et al dalam *Social Communication* (1990) berusaha menempatkan iklan dalam suatu perspektif kelembagaan (menjembatani hubungan antara bisnis dan media) di mana persoalan peran iklan dalam penjualan tidak begitu penting dan menarik lagi, dibanding perannya sebagai lokomotif *komunikasi sosial*. Di sini bagaimana iklan mencoba menarik para konsumen dengan dimensi-dimensi yang tidak berhubungan langsung dengan barang-barang tersebut, baik dimensi identitas individual, kelompok atau keluarga, kebahagiaan dan kepuasan, gender seksual dan sebagainya. Bahkan Kline dalam karyanya *Out of the Garden* (1994) lebih pesimis dan negatif lagi, bahwa iklan pemasaran produk mainan anak-anak telah menimbulkan sekian dampak jelek terhadap jenis permainan yang dimainkan anak-anak (membatasi imajinasi dan kreativitas anak) serta terhadap interaksi antar gender dan interaksi orang tua-anak.

3. Perseroan Terbatas

Konsep "perseroan terbatas" merupakan konsep yang paling populer dalam ekonomi, yang mendasarkan kepemilikan dan tanggung jawab pada sejumlah saham, dan sepenuhnya diakui sebagai badan hukum. Terdapat tiga karakteristik dalam perseroan terbatas; (1) setiap utang perusahaan, menjadi tanggung jawab perusahaan, dan tidak bisa dikaitkan dengan kekayaan pribadi pemegang sahamnya; (2) identitas perusahaan tidak akan berubah sekalipun saham dialihkan ke pihak lain; (3) hubungan kontraktual dilakukan dan menjadi tanggung jawab dewan direksi (Reekie, 2000: 176).

Oleh karena tiga karakteristik yang dimiliki badan usaha 'perseroan terbatas' tersebut maka jenis badan usaha itu merupakan suatu lembaga yang paling mudah berkembang. Hal ini dapat dipahami karena risiko utang bagi pemilik saham bisa diabaikan sehingga perseroan bisa berani berekspansi secara maksimal, selama masih ada pihak yang memberikan pinjaman usaha. Kemudahan jual-beli saham juga membuat badan usaha ini tidak terpengaruh oleh preferensi individual pemilinya. Status *persona* perusahaan ini memungkinkan dilakukannya pembagian tugas, risiko dan tanggung jawab antara pemilik dan pengelola perusahaan.

Beberapa ekonom ternama memberikan komentar yang beragam terhadap perseroan terbatas tersebut. Schumpeter dalam *Capitalism, Socialism and Democracy* (1950) mengkritik hal itu sebagai suatu hal yang akan menyulitkan pengelolaannya. Namun Hessen dalam *In Defense of Corporation* (1979) berpendapat justru dengan terbatasnya tanggung jawab pemilik perusahaan sebatas saham yang dimilikinya dan prinsip kepemilikan bersama adalah suatu kontrak khas swasta, bukan negara/pemerintah. Penyusunan kontrak secara bebas adalah wahana peningkatan efisiensi yang sangat diperlukan kalangan swasta, bukan untuk mengelakkan tanggung jawab.

Perlu diketahui bahwa secara historis, terbatasnya tanggung jawab pemilik perusahaan merupakan keistimewaan yang diberikan pemerintah Inggris pada abad ke-15 guna merangsang minat usaha swasta. Kemudian pada abad ke-17 prinsip tersebut disebar-luaskan ke berbagai wilayah jajahan Inggris melalui East

India Company dan Hudson Bay Company yang kemudian dibakukan menjadi undang-undang parlemen pada tahun 1662 (Clapham, 1957). Sejak saat itu badan usaha ini makin populer karena merangsang kreativitas dan keberanian para pengusaha dalam menekuni bisnis. Bahkan jenis badan usaha ini pula yang kemudian mengembangkan beberapa jalan raya dan kereta api ternama di Inggris pada tahun 1780-1790-an dan 1830-1840-an (Reekie, 2000; 176).

G. Generalisasi-generalisasi Ilmu Ekonomi

1. Skarsitas

Kelangkaan (skarsitas) akan barang dan jasa timbul apabila kebutuhan (keinginan) seseorang ataupun masyarakat akan lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Dengan demikian *kelangkaan* akan muncul apabila tidak cukup barang dan jasa tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

2. Produksi

Dalam sistem perekonomian modern, berlangsung berbagai aktivitas *produksi* yang sangat banyak dan beragam. Dalam masyarakat agraris, aktivitas pertanian menggunakan pupuk, benih, tanah, dan tenaga kerja yang menghasilkan beras dan jagung. Dalam masyarakat industri, pabrik-pabrik modern menggunakan bahan mentah, energi, mesin, tenaga kerja untuk menghasilkan televisi, komputer, mobil, telpon dan sebagainya. Begitu juga dalam dunia usaha penerbangan, banyak menggunakan pesawat terbang, bahan bakar, tenaga kerja, dan sistem *reservasi* terkomputerisasi sehingga penumpang memungkinkan untuk melakukan *traveling* ke berbagai rute penerbangan dengan metode kerja yang cepat dan modern. Dengan demikian semuanya ini berusaha untuk *berproduksi* secara efisien atau dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dengan kata lain mereka selalu berusaha untuk memproduksi pada tingkat *output* yang maksimum dengan menggunakan sejumlah input tertentu.

3. Konsumsi

Konsumsi selalu merupakan satu-satunya unsur GNP yang terbesar dari seluruh pengeluaran. Untuk itu alat pokok dalam analisis ini adalah bagaimana mengaitkan pengeluaran untuk konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable konsumen. Akan tetapi perbandingan konsumsi dan pendapatan tersebut tidaklah selalu linier, karena ada batas tambahan uang yang dibelanjakan untuk makanan, di mana orang tidak bisa makan makin banyak dan makin enak terus searah dengan peningkatan pendapatannya. Maka mulai batas tersebut proporsi dari seluruh pengeluaran untuk makanpun mulai menurun atau sebaliknya kecenderungan tabungan semakin menaik.

4. Investasi

Kenaikan investasi dapat mendorong kenaikan pendapatan. Proses kenaikan pendapatan sebagai akibat kenaikan investasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Injeksi dana investasi memungkinkan produsen menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Untuk itu ia akan membeli faktor produksi yang lebih banyak lagi. Sebagai akibatnya pendapatan yang diterima konsumen meningkat.

Kenaikan pendapatan konsumen tersebut akan mendorong mereka menambah konsumsi, tabungan atau keduanya.

5. *Pasar*

Dalam sebuah sistem ekonomi *pasar*, tidak ada individu maupun organisasi yang secara seorang diri bertanggung jawab atas penetapan harga, produksi, konsumsi, dan distribusi, Khusus untuk harga, yang menggambarkan kesepakatan antara orang dan perusahaan yang dengan sukarela melakukan pertukaran berbagai komoditas. Di samping itu harga juga merupakan sinyal bagi produsen dan konsumen. Harga juga mengkoordinasikan keputusan-keputusan para produsen dan konsumen dalam sebuah pasar. Harga-harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembelian konsumen dan mendorong produksi. Harga-harga yang lebih rendah mendorong konsumsi dan menghambat produksi. Harga adalah roda penyeimbang dari mekanisme *pasar*.

6. *Uang*

Uang pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Dengan demikian secara umum uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi; (1) sebagai alat tukar-menukar; (2) sebagai alat penyimpan kekayaan; (3) sebagai alat pengukur nilai.

7. *Letter of Credit*

Sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir adalah apa yang disebut "*Letter of Credit*". Sebab dengan sistem *Letter of Credit* tersebut dapat memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir dalam pembayaran barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

8. *Neraca Pembayaran*

Suatu negara dalam mempertimbangkan langkah-langkah guna menyeimbangkan neraca pembayaran, negara yang bersangkutan harus memfokuskan diri pada neraca transaksi berjalan jika ia menginginkan berfungsinya perekonomian riil, dan (jika sedang defisit) ingin menghindari penurunan terus-menerus atas nilai tukar mata uangnya

9. *Bank dan Perbankani*

Bank sentral pada dasarnya mempunyai tugas untuk memelihara supaya sistem moneter bekerja secara efisien, sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit/uang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut tanpa mengakibatkan inflasi yang berarti. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral bertanggungjawab atas: (1) perumusan serta pelaksanaan kebijaksanaan moneter; (2) mengatur dan mengawasi serta mengendalikan sistem moneter.

10. Koperasi

Beberapa kasus yang banyak terjadi kurang majunya sistem ekonomi koperasi di Indonesia, pada umumnya disebabkan masih rendahnya kesadaran berkoperasi serta kurangnya etos yang berdisiplin baik di tingkat pengurus maupun para anggotanya.

11. Kebutuhan Dasar

Kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak cukup lagi didefinisikan hanya dengan mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan fisik individunya saja, melainkan harus melibatkan syarat-syarat fisik serta layanan lainnya yang jelas-jelas dibutuhkan oleh komunitas lokal. Penguraian *kebutuhan dasar* tersebut bergantung pada beberapa asumsi mengenai berfungsinya dan berkembangnya masyarakat.

12. Kewirausahaan

Suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh, banyak wirausahawan yang sukses adalah para pendatang atau imigran yang walaupun dengan semangat kantong kosong, anggota kelompok minoritas keagamaan yang militan jauh lebih berhasil dibanding kelompok lain (Casson, 2000: 298).

13. Perpajakan

Tradisi membayar *pajak* tepat pada waktunya sebagai bagian integral dalam mentaati perundangan yang berlaku, tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan suatu tingkat kesadaran yang tinggi dan terjalin kuat rasa saling percaya mempercayai antara rakyat dengan pemerintah yang ada. Namun bagi sejumlah pemerintahan yang tidak transparan, korup, dan tidak *accountable* akan sulit menumbuhkan kesadaran bagi rakyatnya untuk mematuhi undang-undang perpajakan tersebut.

14. Periklanan

Pengaruh *periklanan*, tidak lagi terbatas pada efek-efek ekonomi, melainkan meluas ke berbagai bidang dan tidak selalu positif tetapi juga negatif. Dalam bidang komunikasi sosial, iklan juga berperan sebagai lokomotif komunikasi sosial. Ia mencoba menarik para konsumen dengan dimensi-dimensi yang tidak berhubungan langsung dengan promosi barang-barang tersebut, seperti dimensi identitas individual, keluarga, maupun kelompok, kepuasan/kebahagiaan, gender, dan sebagainya (Leiss: 1990).

15. Perseran Terbatas

Badan usaha perseroan terbatas yang memiliki ciri-ciri independensi yang tinggi serta dapat mngabaikan risiko utang bagi pemilik berani berekspansi secara maksimal selama masih ada pihak yang mau memberikan pinjaman usahanya (Reekie, 2000: 176).

H. Teori-teori Ilmu Ekonomi

Teori ekonomi makro adalah teori ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan, secara besar-besaran, menyangkut keseluruhan sistem dan organisasi ekonomi. Dalam ekonomi makro dibahas teori-teori yang bersifat umum dari gejala-gejala ekonomi keseluruhan. Hal ini terutama menyangkut peristiwa-peristiwa ekonomi yang berhubungan dengan tingkat harga umum; keseluruhan permintaan dan penawaran yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan jumlah produksi masyarakat keseluruhan. Jumlah kesempatan kerja dan lapangan kerja serta penempatan kerja dari seluruh tenaga kerja yang ada dalam masyarakat. Jadi teori ekonomi makro membahas keseluruhan gejala dan peristiwa dalam kehidupan ekonomi, hubungannya satu sama lain baik yang bersifat hubungan kausal maupun hubungan fungsional.

Berbeda dengan teori mikro, yang merupakan suatu teori yang membahas peristiwa atau hubungan-hubungan kausal dan fungsional antara beberapa peristiwa ekonomi yang bersifat khusus. Pengertian khusus di sini adalah pada kajian-kajian yang lebih terbatas (spesifik) seperti pada; orang tertentu, keluarga tertentu, perusahaan tertentu, dan sebagainya. Dengan demikian pokok kajian utama pada teori mikro tersebut terbatas pada kebutuhan, barang dan jasa, harga, upah, pendapatan, dari suatu organisme ekonomi dalam lingkup rumah-tangga, keluarga atau perusahaan (Chourmain dan Prihatin, 1994: 19).

1. Teori Ekonomi Klasik Adam Smith

Teori ini merupakan karya Adam Smith yang dituangkan dalam buku *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Smith adalah seorang Guru besar Falsafah Moral di Universitas Glasgow yang memusatkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum, yaitu bagaimana menciptakan kerangka politik dan sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara swasembada (Jhingan, 1994: 138; Sastradipoera, 2001). Adapun pokok-pokok pikiran dari teori sebagai berikut:

- a. *Kebijaksanaan Pasar Bebas*: dalam arti tercapainya suatu keterlibatan pemerintah yang minimum untuk mencapai suatu bentuk ‘persaingan yang sempurna’, maka secara otomatis harus bebas atau seminimal mungkin campur tangan pemerintah. Karena itu semboyannya *the best government governs the least*. Sebab teori berasumsi bahwa yang akan memaksimalkan pendapatan nasional adalah “*tangan-tangan yang tak kelihatan*”.
- b. *Keuntungan, Merangsang bagi Investasi*; Menurut pandangan teori ini bahwa keuntungan itu merangsang investasi. Artinya semakin besar keuntungan, akan semakin besar pula akumulasi modal dan investasi.
- c. *Keuntungan Cenderung Menurun*: Artinya keuntungan tidak akan naik secara terus –menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antarkapitalis meningkat. Alasannya adalah, dengan naiknya upah sebagai akibat persaingan antar kapitalis. Sementara upah dan sewa naik karena naiknya harga-harga pangan. Hal ini mendapat pembenaran juga dari Ricardo.
- d. *Keadaan Stationer*; Para ahli ekonomi klasik meramalkan akan timbulnya keadaan *stationer* pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan

mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal.

2 Teori Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Modernisasi Menurut Rotow

Mungkin teori pertumbuhan Ekonomi Modernisasi yang paling terkenal adalah teori dari ekonom W.W. Rostow yang ditulis dalam bukunya *The Stage of Economic Growth : A Non-Communist Manifesto* (1960) dan juga dalam *The Process of Economic Growth* (1953), yang kajiannya secara memaknai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Menurut Rostow, perkembangan ekonomi suatu masyarakat meliputi lima tahap perkembangan; (1) *tahap masyarakat tradisional*; (2) *tahap prakondisi tinggal landas*; (3) *tahap tinggal landas*; (4) *tahap maturity (kematangan)*; (5) *tahap konsumsi massa tinggi atau besar-besaran*.

a. *Tahap Tradisional*; Masyarakat tradisional diartikan sebagai ‘suatu masyarakat yang strukturnya berkembang disepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi pra-Newtonian: zaman dinasti-dinasti Cina, Peradaban Timur Tengah dan daerah Mediterania, dunia Eropa pada abad pertengahan (Rostow, 1960: 5). Dalam masyarakat ini pertanian masih mendominasi aktivitas ekonomi, dan kekuatan politik umumnya masih pada penguasa tanah. Ini tidak berarti pada masyarakat ini tidak ada perubahan ekonomi. Sebenarnya banyak tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan pertambahan penduduk yang nyata. Namun fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis masih bertumbuk dengan suatu batas (pagu) yaitu “tingkat output” perkapita yang dapat dicapai. Selain itu struktur sosial masyarakat seperti itu berjenjang; hubungan dan keluarga memainkan peranan yang menentukan (Jhingan, 1994: 180).

b. *Tahap pra-kondisi tinggal landas*: Pada tahap ini merupakan masa transisi di mana persyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Di Eropa Barat sejak akhir abad ke 15 dan awal abad ke-16 menempatkan kekuatan “penalaran” (*reasoning*) dan “ketidakpercayaan” (*skepticism*) yang merupakan pengaruh empat kekuatan (*Renaissance*, Kerajaan Baru, Dunia Baru dan Agama Baru atau Protestan), sebagai pengganti “kepercayaan” (*faith*) dan “kewenangan” (*authority*) mengakhiri feodalisme dan membawa ke kebangkitan negara kebangsaan, menanamkan semangat pengembaraan yang menghasilkan berbagai penemuan dan dominannya kaum borjuasi dalam dunia usaha. Manusia-manusia baru yang mau bekerja keras muncul memasuki sector ekonomi swasta, pemerintah atau dua-duanya, manusia baru yang bersemangat menggalakkan tabung dan berani mengambil risiko dalam mengejar keuntungan. Bank dan lembaga lain bermunculan untuk mengerahkan modal, sehingga investasi meningkat di berbagai bidang; pengangkutan, perhubungan dan bahan mentah yang memiliki daya tarik ekonomis bagi bangsa lain. Jangkauan perdagangan dari dalam dan luar negeri

menjadi makin luas. Di mana-mana muncul perusahaan manufacturing yang menggunakan metode baru (Rostow, 1960: 6-7).

- c. *Tahap Tinggal Landas*: Merupakan masa awal yang menentukan di dalam suatu kehidupan masyarakat

“ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya... kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan ; dan kepentingan bersama membentuk struktur masyarakat tersebut. ... bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur, seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok,... revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi yang dalam jangka waktu relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan (Rostow, 1960: 9-11).

- c. *Tahap Kematangan (Maturity)*: Rostow mendefinisikan merupakan tahapan ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumberdaya mereka. Masa ini juga merupakan suatu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa empat dasawarsa. Teknik produksi baru menggantikan teknik yang lama. Berbagai sektor penting baru tercipta. Tingkat investasi neto lebih dari 10 % dari pendapatan nasional. Dan, perekonomian mampu menahan segala guncangan yang tak terduga. Dalam hal ini Rostow memberikan bukti-bukti simbolik kematangan teknologi pada negara-negara industri seperti; Inggris (1850), Amerika Serikat (1900), Jerman (1910), dan Prancis (1910), Swedia (1930), Jepang (1940), Rusia (1950); Kanada (1950) (Jhingan, 1994: 187).

- f. *Tahap Konsumsi Masa Tinggi atau Besar-besaran*: Merupakan suatu masa yang ditandai dengan pencapaian banyak sektor penting (*leading sector*) dalam perekonomian berubah menuju produksi barang dan jasa konsumsi. Abad konsumsi besar-besaran juga ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama, Pada tahap ini “keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas”. Tetapi ada tiga kekuatan yang nampak dalam tahap purna dewasa ini, yaitu: *Pertama*, penerapan kebijaksanaan guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional; *Kedua*, ingin memiliki suatu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan bagi para pekerja; *Ketiga*, keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah murah, berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, dan sebagainya (Jhingan, 1960: 114).

3. Teori Dampak Balik dan Dampak Sebar Menurut Myrdal

Gunnard Myrdal seorang ahli ekonomi Swedia dan pejabat pada Perserikatan Bangsa-bangsa, terkenal dengan tulisannya *Economic Theory and Underdeveloped Regions* (1957), dan *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations* (1968), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (Blackwash effects) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Sebaliknya di negara terbelakang proses kumulatif dan dsirkuler juga dikenal istilah “lingkaran setan kemiskinan”, berjalan menurun, dan karena tidak teratur menyebabkan meningkatnya ketimpangan Myrdal yakin bahwa bahwa “pendekatan teretis yang kita warisi” tidak cukup menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi tersebut. Teori perdagangan internasional dan tentu saja teori teori ekonomi secara umum, tidak pernah disusun untuk menjelaskan realitas keterbelakangan dan pembangunan ekonomi (Myrdal; 1957).

Tesis Myrdal, ia membangun dari suatu keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk itu ia menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. ‘*Dampak Balik*’, adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat, karena sebaba-sebab di luar tempat itu, atau juga bisa disebut dampak migrasi. Yang merupakan perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses-proses sebab-musebab sirkuler antara faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi.
- b. Sedangkan ‘*Dampak Sebar*’ menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilyah-wilayah lainnya. “Sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara terbelakang.
- c. *Ketimpangan Regional*; terjadi lebih banyak berakar pada dasar non-ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba, di mana terpusat di wilayah-wilayah (negara-negara) yang memiliki harapan-laba tinggi. Penyebab gejala ini oleh peranan bebas kekuatan pasaryang cenderung memperlebar ketimpangan regional. Karena produksi, industry, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan cenderung mendatangkan keuntungan bagi wilayah maju (Myrdal, 1957: 26).
- d. *Dampak balik* dan *dampak sebar* ini dalam laju perkembangannya tidak mungkin berjalan seimbang. Karena *pertama*, ketimpangan regional jauh lebih besar di negara-negara miskin daripada di negara-negara kaya. Kedua, di negara-negara miskin ketmpangan regional semakin mlebar sedangkan di negara maju menyempit. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi tingkat pembangunanekonomi yang sudah dicapai suatu negara, biasanya semakin kuat pula dampak sebar yang akan terjadi. Mengingat pembangunan tersebut disertai oleh transportasi dan komunikasi yang makin baik, tingkat pendidikan makin tinggi dan semakin dinamis antara ide dan nilai yang kesemuanya

cenderung memperkuat daya-sebar sentrifugal tersebut dan cenderung melunak hambatan-hambatannya. Dengan demikian sekali suatu negara berhasil mencapai tingkat pembangunan yang tinggi, pembangunan ekonomi akan menjadi suatu proses yang berjalan otomatis. Sebaliknya, sebabutama keterbelakangan terletak pada lemahnya dampak sebar, kuatnya dampak balik, sehingga dalam proses yang semakin menggumpal kemiskinan itu adalah penyebab yang berasal dari dirinya sendiri.

- e. *Peranan pemerintah*; Kebijakan nasional sering memperburuk ketimpangan regional, terutama oleh peranan kekuatan pasar bebas dan kebijakan liberal sebagai akibat lemahnya dampak sebar. Faktor lain yang merupakan penyebab ketimpangan regional di negara miskin adalah “lembaga feodal yang kokoh dan lembaga lainnya yang tidak egaliter serta struktur kekuasaan yang membantu si kaya menghisap si miskin (Myrdal, 1957: 28). Oleh karena itu pemerintah negara terbelakang, harus menerapkan kebijakan yang adil dan egaliter.
- f. *Ketimpangan Internasional*; Pada umumnya perdagangan internasional menguntungkan negara kaya dan memperlemah negara terbelakang. Sebab negara maju/kaya memiliki basis industri manufaktur yang kuat dengan dampak sebar yang kuat pula. Dengan mengekspor produk industri mereka yang murah ke negara terbelakang, mereka akan mematikan industri skala kecil. Ini cenderung mengubah negara terbelakang menjadi produsen barang primer untuk ekspor. Mengingat permintaan akan barang-barang ekspor inelastik (di pasar ekspor), maka mereka menderita akibat fluktuasi harga yang gila. Sebagai konsekuensinya mereka tidak dapat mengambil untung dari naik turunnya harga barang di dunia ekspor.
- g. *Perpindahan modal*; juga gagal menghapuskan ketimpangan internasional. Karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi para investor, maka modal akan semakin menjauhkan diri dari negara terbelakang. Modal yang mengalir ke negara terbelakang diarahkan sebagian besar kepada produksi barang primer untuk ekspor, dan ini akan merugikan mereka karena dampak balik yang kuat. Apapun yang diinvestasikan pihak asing, akan meningkatkan dampak balik yang domain serta tidak menjadi pemecah masalah dalam ketimpangan internasional (Jhingan, 1994: 274).

4. Teori Nilai Surplus Karl Marx

Karl Marx adalah seorang filosof Jerman (1818-1883) yang di mata para ekonom Barat adalah seorang agitator yang telah membangkitkan persatuan kalangan kaum buruh dan intelektual selama lebih dari seabad yang telah merasa dirugikan oleh kapitalisme pasar dan sekaligus sebagai penjerumus ekonomi ke abad kegelapan baru. Kemudian ia menghancurkan ikatan kapitalisme dan mengoyak-oyak dasar-dasar sistem kebebasan natural Adam Smith (Skousen, 2005: 163-164).

Sesuai dengan sub-judul di atas, pada kajian teori “Nilai surplus” di sini tidak akan dibahas tentang peranan Karl Marx di bidang filsafat sejarah, politik, maupun komunisme, serta alienasi. Adapun pokok pikiran yang dituangkan Marx dalam teori nilai surplus tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jika tenaga kerja adalah satu-satunya penentu nilai, lalu ke mana profit dan bunganya? Marx menyebut profit dan bunganya itu sebagai “nilai surplus”.
2. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa kapitalis dan pemilik tanah adalah pihak yang mengeksploitasi para pekerja.
3. Jika semua nilai adalah produk dan tenaga kerja, maka semua profit yang diterima adalah oleh kapitalis dan pemilik tanah pastilah merupakan “nilai surplus” yang diambil secara tidak adil dari pendapatan kelas pekerja.
4. Adapun rumus matematisnya untuk teori nilai surplus tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut: “Bahwa tingkat profit (p) atau eksploitasi adalah sama dengan nilai surplus (s) dibagi dengan nilai produktif akhir (r). Dengan demikian:

$$p = s/r$$

Misalkan; andaikata pabrik pakaian mempekerjakan buruh untuk membuat baju. Sedangkan kapitalis menjual bajunya seharga \$ 100 per/buah, tetapi ongkos tenaga kerja adalah \$ 70 per / baju. Karena itu tingkat profit atau eksploitasinya adalah:

$$p = \$ 30 / \$ 100 = 0,3, \text{ atau } 30 \text{ persen}$$

5. Marx membagi nilai produk akhir menjadi dua bentuk modal (modal) yakni modal konstan (C) dan modal variabel (V). Modal konstan merepresentasikan pabrik dan peralatan. Modal adalah biaya tenaga kerja.

Jadi, persamaan untuk tingkat profit menjadi:

$$p = s / (v + c)$$

5. Teori Monetarisme Pasar Bebas Friedman

Milton Friedman lahir pada 1912 di Brooklyn, satu-satunya anak lelaki dari empat bersaudara imigran Yahudi Eropa Timur bekerja serabutan di New York. Pada tahun 1932 saat depresi Friedman dapat beasiswa untuk belajar ekonomi di University of Chicago.. Di samping ia bertemu dengan rekannya George Stigler seumur hidupnya, dia juga di Chicago bertemu Rose Director, yang kelak menjadi istrinya. Dan, tahun 1938 Friedman menikah dengan Rose, mereka menjadi rekan dan bersama-sama menulis beberapa buku, serta dikaruniai dua anak. Friedman mendapat gelar master tahun 1933. Kemudian tahun 1946 Friedman memperoleh gelar Ph.D. dari Columbia, dan ia kembali mengajar di *University of Chicago*, bahkan melanjutkan tradisinya memperkuat versi terbaru dari teori kuantitas uang Irving Fisher, yang diterapkannya pada kebijakan moneter. Dia menulis banyak topik yang berkaitan dengan ekonomi moneter, dan berpuncak pada riset dan tulisan empirisnya yang paling terkenal, “*A Monetary History of the United States 1867-1960*” yang dipublikasikan oleh *National Bureau of Economic Research* dan ditulis bersama Anna J.Schwartz (1963). Pada intinya studi monumental ini menunjukkan kekuatan uang dan kebijakan moneter dalam gejolak perekonomian Amerika Serikat, termasuk Depresi Besar dan era pascaperang, ketika para ekonom arus utama percaya bahwa “uang tidak penting”. Kemudian ia juga menulis buku *Capitalism and Freedom* yang diluncurkan pada ulang tahun perkawinan Friedman dan Rose ke-25.

Inti teorinya sebagai berikut:

- a. Metodologi Positivisme; menurut Friedman validitas suatu teori tidak tergantung pada unsur generalisasinya maupun kekokohan asumsi-asumsi dasarnya, melainkan semata-mata pada kesesuaian implikasi-implikasinya secara relatif terhadap implikasi teori-teori lain, yang diukur berdasarkan statistik primer.
- b. Pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, asalkan didukung kebebasan politik intelektual ; para ekonom aliran Chicago melihat perekonomian sebagai suatu kondisi perlu , namun bukan kondisi cukup untuk menciptakan masyarakat bebas;
- c. Aturan moneter yang ketat lebih disukai untuk pengambilan keputusan yang diskret oleh otoritas pemerintah. "Setiap sistem yang memberi banyak kekuasaan dan banyak keleluasaan bagi segelintir orang di mana kekeliruan mereka entah itu disengaja atau tidak — bisa menimbulkan efek yang luas adalah sistem yang buruk" (Friedman, 1982: 50).
- d. Ia lebih menekankan pada kebijakan moneter. Q, kuantitas uang jauh lebih penting daripada P. "Opininya yang segar dan sangat berbeda" dengan opini Fisher dan Simons datang seperti "kilatan tiba-tiba", baginya "aturan dari sudut pandang kuantitas uang jauh lebih unggul, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang, ketimbang aturan dari sudut pandangstabilisasi harga" (Friedman, 1969: 84).
- e. Pengelolaan administratif dan intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat *ad hoc* hanya akan merusak situasi ekonomi; dalam soal kebijakan moneter dan fiskal, ia menekankan pentingnya kesinambungan;
- f. Ia menolak standar emas sebagai *numeraire* moneter dengan dua alasan. *Pertama*, biaya *resources*-nya yang tinggi, dan *kedua* implementasinya yang tidak praktis. Selain itu produksi emas jarang dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan karena itu bersifat deflasioner. "Betapa absurdnya menyia-nyikan sumber daya untuk menggali tanah mencari emas, hanya untuk menguburkannya lagi di kolong Fort Knox, Kentucky".
- g. Monetarisme jauh lebih baik daripada fiskalisme dalam regulasi makroekonomi.
- h. Kebijakan fiskal baginya diyakini sebagai wahana yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan, namun redistribusi pendapatan bagi kalangan di atas garis kemiskinan justru akan lebih banyak menimbulkan kerugian, serta;
- i. Imperialisme disipliner yang menonjolkan penerapan analisis ekonomi oleh para ekonom terhadap semua bidang yang biasanya dianggap sebagai disiplin lain/luar seperti sejarah, politik, hukum, dan sosiologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (1992) *Materi Pokok Pendidikan IPS-2: Buku 1, Modul 1*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , PPPG Tertulis.
- Albion, P. dan Farris, M. (1981) *The Advertising Controversy*, Boston, MA.
- Alchian, A.A. (1961) "Some economics of property rights" dalam A.A. Alchian, *Economics Forces at Work*, Indianapolis, I.N:.
- Amir, M.S. (1996) *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM.
- Arrow.K.J. (1963) *Social Choice and Individual Value*, Edisi Kedua, Cambridge: United Kingdom..
- Asimakopulos, A. (2000) "Ekonomi Mikro" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 660-661.
- Atkinson, A.B. dan Stiglitz, J.E.(1980) *Lectures on Public Economic*, Maidenhead.
- Bliss. Christopher (2000) "Ilmu Ekonomi" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn. 272-277..
- Blumberg, Rae Leeser (1978) *Stratification: Socioeconomic and Sexual Inequality*, Dubuque, Iowa: Brown.
- Boland, Lawrence, A. (2000) "Ekonomi Neo-Klasik" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.700-701.
- Britton, Andrew (2000) "Kebijakan Makroekonomi" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.595-597.
- Bronffebrenner, Martin, (2000) "Aliran Chicago" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 103-104.
- Brown, C.V. (2000) "Perpajakan" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 1082-1083.

- Casson, Mark, (2000) “Entrepreneurship (Kewirausahaan)” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 297-298.
- Casson, Mark (1982) *The Entrepreneur: An Economic Theory*, London: Allen dan Unwin.
- Choumain, Imam dan Prihatin (1994) *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta: Depdikbud
- Clapham, J. (1957) *A Concise Economic History of Britain from the Earliest Times to 1750*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Coase, R.H. (1937) “The Nature of the Firm”, dalam *Economica*, 4.
- Cochrane, A.L. (1971) *Effectiveness and Efficiency*, London: Allen dan Unwin.
- Coleman, J.S. (1990) *Foundations of Social Theory*, Cambridge, MA: Cambridge university Press.
- Eatwell, John , et.al (1987) *The Palgrave: A Dictionary of Economics*, London: McMillan Press Limited.
- Eggerstson, Thrainn, (2000) “Ekonomi Institusional” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 501-503.
- Estrin, Saul (2000) “Koperasi” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 174-176.
- Fletcher, G.A (1989) *The Keynesian Revolution and its Critics*, London: Macmillan.
- Fried, Morton,H. (1967) *The Evolution of Political Society*, New York: Random House.
- Friedman, Milton (1982) *Capitalism and Freedom*, Chicago: University of Chicago Press.
- Friedman, Milton (1969) *The Optimum Quantity of Money and Other Essay*, London: Macmillan.

- Fudenburg, D. dan Tirole, J. (1991) *Game Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hessen, R. (1979) *In Defense of The Corporation*, Stanford, CA.
- Hicks, J.R. (1969) “Preface and Manifesto” dalam K.J. Arrow dan T. Scitovsky (eds) *Reading in Welfare Economic*, London.
- Hirst, Paul (2000) “Sosialisme” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 1012-1014.
- Hughes, Gordon, (2000) “Ekonomi Matematik” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.630-631.
- Jhally, Sut (2000) “Periklanan” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 7-9.
- Jhingan, M.L. (1994) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Diterjemahkan Oleh D. Guritno, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keynes, John Maynard (1973[1936]) *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, London: Macmillan.
- Kline, S, (1994) *Out of the Garden*, London: Harper & Row, Publisher.
- Landes, D. (1968) *The Unbound Prometheus*, Cambridge, UK. Cambridge University Press.
- Ledyard, J. (1995) “Public Goods: a survey of experimental research, dalam J. Kagel dan A.E. Roth (eds) *Handbook of Experimental Economics*, Princeton, N.J.
- Leijonhufvud, Axel (1968) *On Keynesian Economics and the Economics of Keynes*, Oxford: Oxford University Press.
- Leiss, W., Kline, S., dan Jhally, S. (1990) *Social Communication in Advertising*, New York.
- Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter, O. (1981) *Economics*, New York: Harper & Row, Publisher.

- Maynard, Alan, (2000) “Ekonomi Kesehatan” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 427.
- Metcalf, J.S. (2000) “Ilmu Ekonomi Evolusioner” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 324-326.
- Milgrom, P. dan Roberts, J. (1992) *Economics, Organization and Management*, Englewood, Cliffs, N.J.
- Mokyr, J. (1991) *The Lever of Riches*, Oxford: Oxford University Press.
- Mullineux, Andy (2000) “Investasi” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 522-524
- Myrdal, Gunnar (1968) *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*, Harmondsworth: Penguin Books.
- Myrdal, Gunnar (1957) *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, London: Duck Worth.
- Nopirin (2000) *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- O’Brien, D.P. (2000) “Ilmu Ekonomi Klasik” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 120-122
- Owen, Stuart (1979) *Captains of Conscience*, New York: Harper & Row, Publisher.
- Pearce, David, W. (2000) “Ekonomi Lingkungan” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.300-301.
- Posner, R.A. (1994) *Economic Analysis of Law* Edisi Keempat, Boston, MA.: Boston University Press.
- Reekie, W. Duncan (2000) “Perseroan Terbatas” dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.176-178.

- Revell, Jack (2000) “Perbankan” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persaa, hlmn.58-60.
- Rostow,W.W. (1960) *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, New York: Cambridge University Press.
- Rostow, W.W. (1953) *The Process of Economic Growth*, New York: Cambridge University Press.
- Roth, Alvin, A. “(2000a) “Ilmu Ekonomi Eksperimental” dalam Kuper, Adam, & Kuper, Jesica, (ed) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn.333-334.
- Rooth, Alvin, A. (1995) “Introduction to experimental economics, dalam J.Kagel dan A.E. Roth (eds) *Hanbbok of Experimental Economics*, Pricenton, UK.
- Samuelson, Paul,A. dan Nordhaus, William,D. (2003) *Ilmu Mikroekonomi*, Alih Bahasa: Nur Rosyidah, Annal Elly, dan Bosco Carvallo, Jakarta: Media Global Edukasi.
- Samuelson, Paul,A. dan Nordhaus, William,D. (1990) *Ekonomi, Jilid 1*, Diterjemahkan Oleh Jaka Wasana, Jakarta: Erlangga.
- Satradipoera, Komaruddin (2001) *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijakanaksanaan Ekonomi*, Bandung: Kappa-Sigma.
- Sastradipoera, Komaruddin (1991) *Uang: Di Negara Berkembang*, Jakarta: Penerbit Bumi Asara.
- Schelling, T.C. (1960) *The Strategy Conflict*, Cambridge, MA. Cambridge of Universty Press.
- Shadily, Hasan (ed) (1980) *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: balai Pustaka.
- Schumpeter, J.A. (1954) *History of Economic Analysis*, New York : Oxford University Press.
- Schumpeter, J.A. (1950) *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Oxford University Press.
- Sen, A.K. (1979) *Collective Choice and Social Welfare*, Amsterdam.
- Skousen Mark, (2005) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-tori Ekonomi Modern: Sebuah Narasi Kritis Pergumulan Intelektual dan*

Kepedihan Sosial di dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Ekonomi,
Alih Bahasa Tri Wibowo Budi santoso, Jakarta: Prenada.

Sunder, S. (1995) "Experimental asset markets: a survey" dalam J.Kagel dan A.E. Roth, (eds) *Hanbook of Experimental Economics*, Pricenton, N.J.

Sweeney, James, L. (2000) "Ekonomi Sumber Daya Alam" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 697-698.

Taylor, Mark (2000) "Teori Makroekonomi" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 597-599.

Thirlwall, A.P. (2000a) "Neraca Pembayaran" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 57-58..

Thirlwall, A.P. (2000b) "Ilmu Ekonomi Aliran Keynes" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 531-532.

Thurstone, L.L. (1931) "*The difference function*", *Journal of Social Psychology*, 2.

Townsend, Peter (2000) "Kebutuhan Dasar" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlmn 61-62.

Williams, R. (180) "Advertising: the magic system: dalam R. Williams (ed) *Problems in Materialism and Culture*, London.

Winardi, (1987) *Pengantar Ekonomi Moneter*, Buku-1, Bandung: Tarsito.